

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN 2022



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 beserta perubahannya dan merupakan bentuk akuntabilitas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai gambaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun *outcomes* di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih.

Cimahi, 17 Maret 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Isu Strategis	4
1.4. Uraian Singkat Organisasi.....	6
1.4.1. Struktur Organisasi.....	6
1.4.2. Sumber Daya Manusia	7
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1. Perencanaan.....	10
2.1.1. Rencana Strategis	10
2.2. Visi dan Misi Kota Cimahi	11
2.2.1. Tujuan dan Sasaran	14
2.2.2. Strategi, Kebijakan serta Program	15
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
2.4. Perjanjian Kinerja (PK)	17
2.3 Program/Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Perjanjian Kinerja dengan Penjelasan.....	25
BAB III	29
AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Hasil (outcome) dan Keluaran (output)	32
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	35
3.2.1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pertama	36
3.2.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kedua.....	60
3.2.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Ketiga	71
3.2.4. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Keempat	77
3.2.5. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kelima.....	94
3.3. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.	96
3.3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.	99

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.	101
3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	105
3.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	105
3.7. Realisasi Anggaran.....	107
BAB IV	111
PENUTUP	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Misi 2 Pemerintah Kota Cimahi	2
Tabel 1. 2	Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Cimahi, Berdasarkan Jabatan Struktural pada Tahun 2022	7
Tabel 1. 3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, berdasarkan Pendidikan pada tahun 2022	8
Tabel 1. 4	Jumlah Tenaga Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022	9
Tabel 2. 1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Diskominfo Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Perubahan.....	11
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	17
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022	18
Tabel 2. 4	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	19
Tabel 2. 5	Perjanjian Kinerja Perubahan Pranata Humas Sub Koordinator Layanan Hubungan Media Tahun 2022	19
Tabel 2. 6	Perjanjian Kinerja Perubahan Pengelola Media Center Tahun 2022.....	19
Tabel 2. 7	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	20
Tabel 2. 8	Perjanjian Kinerja Perubahan Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur Dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	20
Tabel 2. 9	Perjanjian Kinerja Perubahan Pranat Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengembangan Aplikasi Dan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.....	20
Tabel 2. 10	Perjanjian Kinerja Perubahan Bidang Penyelenggaraan E-Government Dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	21
Tabel 2. 11	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Persandian Dan Pengembangan Sumber Daya Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.....	22
Tabel 2. 12	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	22
Tabel 2. 13	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Data Dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	22
Tabel 2. 14	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	23
Tabel 2. 15	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Program Dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	24
Tabel 2. 16	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	24
Tabel 2. 17	Pagu anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun anggaran 2022	26
Tabel 3. 1	Formula pengukuran/penghitungan realisasi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika	30
Tabel 3. 2	Capaian Sasaran Strategis/IKU Tahun 2022	31
Tabel 3. 3	Capaian Indikator Kinerja Hasil dan Keluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022	32
Tabel 3. 4	Capaian Kinerja Sasaran Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022	36
Tabel 3. 5	Target dan Realisasi Sasaran Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian Tahun 2022	37
Tabel 3. 6	Data Penambahan Sub Domain Baru.....	48

Tabel 3. 7	Daftar Layanan Administrasi dan Layanan Publik yang dilaksanakan secara online di Pemerintah Kota Cimahi	50
Tabel 3. 8	Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022 Kota Cimahi	58
Tabel 3. 9	Nama Peserta dan Materi Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Program <i>Smart City</i>	60
Tabel 3. 10	Target dan Realisasi Sasaran Program Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Informasi, Komunikiasi Publik dan Statistik Tahun 2022	61
Tabel 3. 11	Jumlah Analisis Berita	62
Tabel 3. 12	Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2022.....	63
Tabel 3. 13	Rincian Berita Pada Website Dan Media Lainnya	68
Tabel 3. 14	Publikasi pemerintahan daerah melalui berbagai media.....	69
Tabel 3. 15	Rekapitulasi Bulanan Publikasi Tahun 2022	70
Tabel 3. 16	Target dan Realisasi Sasaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial Bidang Informasi, Komunikiasi Publik dan Statistik Tahun 2022.....	71
Tabel 3. 17	Survey Statistik Sektorial yang dilaksanakan selama tahun 2022	76
Tabel 3. 18	Pencapaian Target Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian Tahun 2022	78
Tabel 3. 19	Daftar Perangkat Daerah Pemilik Aplikasi yang telah dilakukan Penetration test/Vulnerability Assesment Tahun 2022	84
Tabel 3. 20	Daftar Aplikasi (Layanan SPBE) yang telah dilakukan Pentest di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.....	85
Tabel 3. 21	Pencapaian Target Kinerja Sasaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Saekretariat Tahun 2022	95
Tabel 3. 22	Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022	96
Tabel 3. 23	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (<i>impact</i>) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, Tahun 2021 dan 2022	100
Tabel 3. 24	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Komunikasi dan Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.....	101
Tabel 3. 25	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Statistik Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	102
Tabel 3. 26	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Komunikasi dan Informatika, Bidang Penyelenggaraan e-Government Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.....	102
Tabel 3. 27	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Persandian Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	103
Tabel 3. 28	Analisa Keberhasilan Dan Kegagalan Kegiatan Kesekretariatan Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.....	104
Tabel 3. 29	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi	7
Gambar 1. 2.....	Grafik ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
Gambar 3. 1.	Tipologi Wide Area Network dan Local Area Network yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.....	38
Gambar 3. 2.	Speedtest Internet Broadband yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	39
Gambar 3. 3.....	CCTV yang terhubung melalui jaringan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	40
Gambar 3. 4	Monitoring jaringan WAN dan LAN.....	41
Gambar 3. 5	Fasilitas video conference pimpinan	42
Gambar 3. 6	Pemeliharaan Perangkat Aktif Jaringan LAN dan WAN.....	42
Gambar 3. 7.....	Server Digunakan sebagai Pusat Data Elektronik Aplikasi Layanan Publik dan Administrasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. ...	43
Gambar 3. 8	Command Center Kota Cimahi.....	44
Gambar 3. 9.	Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Cimahi	46
Gambar 3. 10	Website resmi pemerintah Kota Cimahi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.....	47
Gambar 3. 11	Penggunaan Aplikasi Cimahi Drive.....	55
Gambar 3. 12	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pemanfaatan Cimahi Drive bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	55
Gambar 3. 13	Rapat Persiapan Evaluasi Smart City 2022.....	58
Gambar 3. 14	Pemaparan Evaluasi Panel Program Smart City Tahun 2022 dilaksanakan secara daring diikuti oleh Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Masterplan Smart City.....	59
Gambar 3. 15	Hasil Analisis Berita Tahun 2022.....	62
Gambar 3. 16	Prosentase Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2022	63
Gambar 3. 17	Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).	64
Gambar 3. 18	Layanan Pesan Singkat Penduduk (PESDUK).	65
Gambar 3. 19	Instagram resmi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.	66
Gambar 3. 20	Pengelolaan konten berita website cimahikota.go.id	67
Gambar 3. 21	Publikasi video melalui chanel youtube humas Cimahi dan cimahikota.go.id.....	67
Gambar 3. 22	Publikasi Talkshow/Advertorial/Liputan/Reportase TV/Radio	69
Gambar 3. 23	Aplikasi.opendata Kota Cimahi hasil replikasi dari.opendata Provinsi Jawa Barat	73
Gambar 3. 24	Publikasi Buku Data Statistik Sektor Kota Cimahi	74
Gambar 3. 25	Publikasi Riset Evaluasi Kebijakan Publik dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Cimahi	75
Gambar 3. 26	Pendampingan pemanfaatan e-mail resmi dinas dan sertifikat elektronik untuk Implementasi Tanda Tangan Elektronik.	80
Gambar 3. 27	Gambar Pengajuan permohonan pembuatan email dinas melalui Aplikasi Silatik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	80
Gambar 3. 28	Pendampingan Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik Pegawai Perangkat Daerah Kota Cimahi guna Implementasi Jaring Komunikasi Sandi melalui Aplikasi Manajemen Kearsipan Dinamis, Srikandi.....	83
Gambar 3. 29	Aktifitas Pengamanan Sinyal Kegiatan Strategis	83
Gambar 3. 30	Hasil Penetration test/Vulnerability Assesment terhadap aplikasi dilandacita.cimahikota.go.id.....	90

Gambar 3. 31 Hasil Penilaian Indeks KAMI Tahun 2022.....	92
Gambar 3. 32 contoh <i>flyer Security Awareness</i> yang telah disebar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.....	94
Gambar 3. 33 Gambar Capaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Teknis penyusunan LKIP dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini disusun sebagai media dalam menyampaikan informasi pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi kepada Walikota Cimahi atas pemberian mandat yang diberikan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada tahun anggaran 2022 dan sebagai pertanggung-jawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran publik tahun anggaran 2022 yang digunakan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak secara langsung.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Urusan tersebut merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Dinas Komunikasi, dan Informasi, Kota Cimahi melalui kewenangannya dan fungsinya diharapkan mampu mendukung pencapaian misi ke 2 melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Misi 2 Pemerintah Kota Cimahi

Misi 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil
			Mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah		Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan barang milik daerah
	Meningkatnya profesionalitas aparatur		Meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang prima
			Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
			Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatkan pelayanan publik kecamatan
			Meningkatkan kualitas dan sarana prasarana pelayanan publik (MPP)
			Meningkatkan kualitas dan integrasi Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK) daerah
			Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat
			Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan

Program prioritas Wali Kota Cimahi yang menjadi target pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah program ke 16 Kemudahan Birokrasi.

RPJMD Kota Cimahi yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Cimahi mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun 2022 tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun 2022. Penyusunan laporan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
- c. Undang- Undang nomo1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- g. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- k. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia
- l. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).

1.3. Isu Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan yang bersifat konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Untuk urusan-urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, dan Informatika, Kota Cimahi, maka urusan konkurensinya sebagai berikut :

- A. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
- B. Urusan Bidang Statistik
- C. Urusan Bidang Persandian.

Merujuk pada RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2022 sesuai dengan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah Peningkatan Daya Saing Kota Melalui Pemerataan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditunjang dengan Kemantapan Infrastruktur. Isu strategis diperoleh melalui hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan memperhatikan lingkungan strategis internal dan eksternal yang meliputi (1) Isu strategis Kota Cimahi Tahun 2017-2022; (2) Capaian pembangunan tahun/periode sebelumnya dan permasalahan pembangunan ; (3) Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Tahun 2020; (4) Isu Strategis Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2020; (5) Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals/SDGs*; dan (6) Kondisi Global.

Lima Belas isu strategis pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah :

1. Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Penanggulangan Pengangguran;
4. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan;
5. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertansportasi;
7. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
9. Optimalisasi Kualitas Pendidikan;
10. Optimalisasi Kualitas Kesehatan;
11. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
12. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat;
13. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk;
14. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
15. Belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur kota dan sinergitas antar wilayah.

Dari isu-isu strategis yang dikemukakan tersebut sesuai dengan dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi berperan dalam turut serta memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan dalam isu optimalisasi tata kelola pemerintahan.

Sedangkan isu strategis yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika :
 - a. Masih belum efektif dan efisiennya praktek manajemen pemerintahan Kota Cimahi karena belum terintegrasinya aplikasi sistem informasi pemerintahan dan masih digunakannya mekanisme kerja manual atau semi manual
 - b. Masih rendahnya intensitas dan kualitas publikasi informasi serta komunikasi kepada masyarakat tentang program dan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar kepada masyarakat
 - c. Masih rendahnya penanganan pengaduan masyarakat di Pemerintahan Kota Cimahi
2. Urusan Statistik :

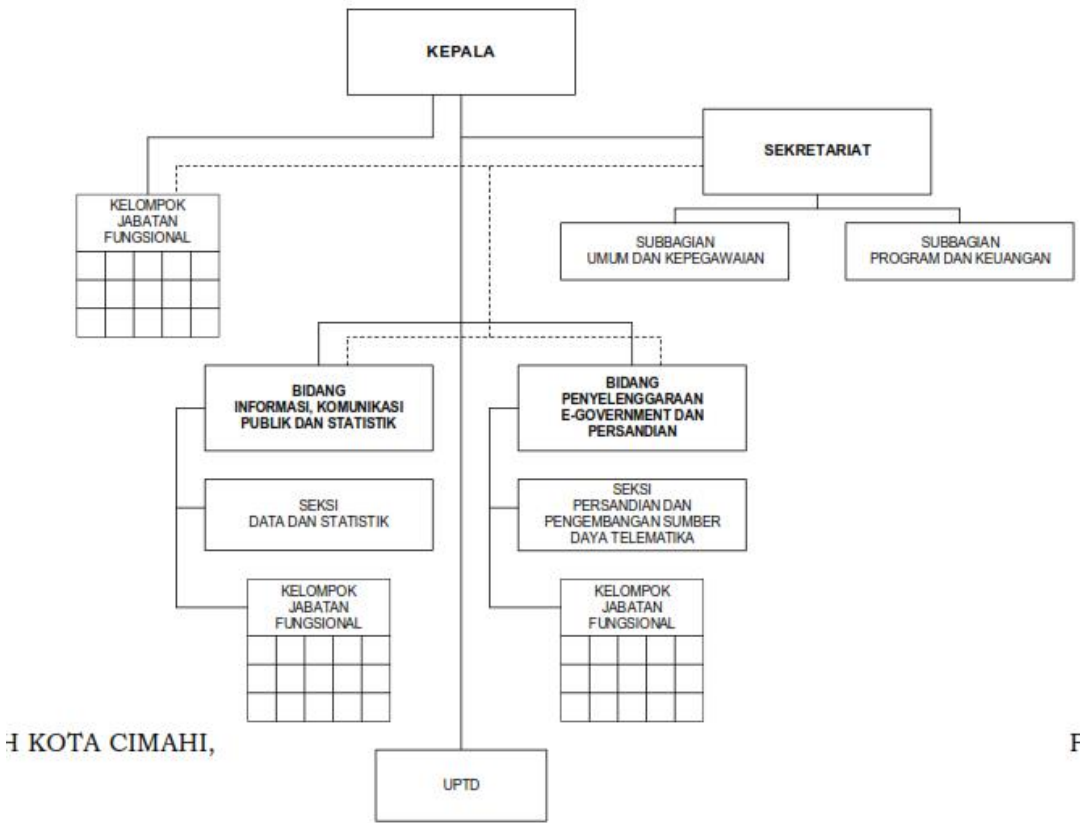
- a. Masih belum terkoordinirnya data-data pembangunan Kota Cimahi
 - b. Masih rendahnya kualitas data dan informasi
3. Urusan Persandian :
- a. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi
 - b. Masih belum terkelolanya menara-menara komunikasi di Kota Cimahi

1.4. Uraian Singkat Organisasi

1.4.1. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, dan Informasi, Kota Cimahi dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, yang menjadi kewenangan Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- i. Kepala Dinas ;
- ii. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
- ii. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, membawahi :
 - 1. Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi; dan
 - 3. Seksi Data dan Statistik.
- iii. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3. Seksi Persandian dan Pengembangan Sumber Daya Telematika.
- iv. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi

1.4.2. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada tahun 2022 Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Cimahi didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 44 orang.

Tabel 1. 2

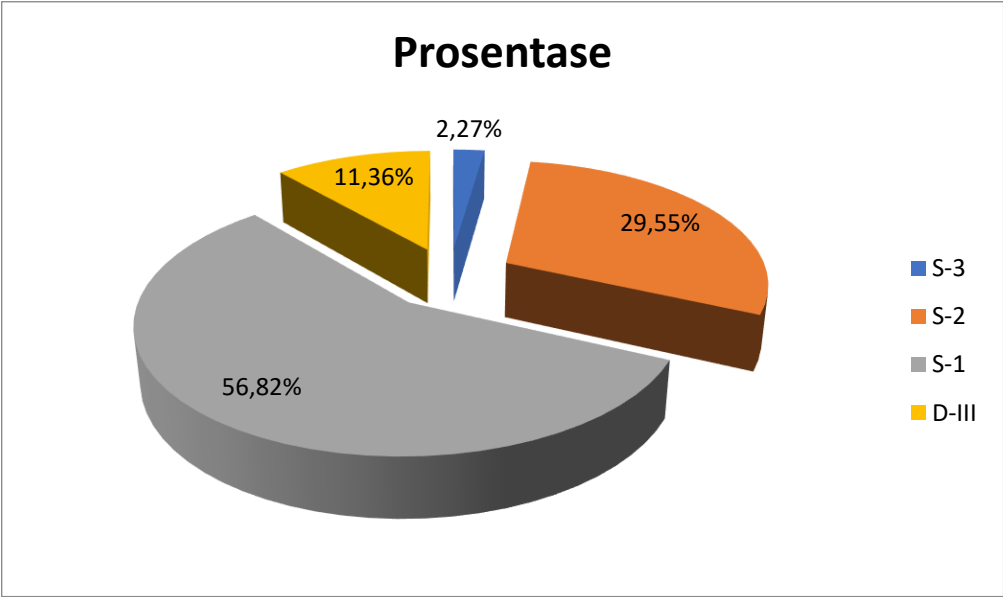
Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Cimahi, Berdasarkan Jabatan Struktural pada Tahun 2022

No	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Eselon 2A	1		1
2	Eselon 3A		1	1
3	Eselon 3B	2		4
4	Eselon 4A	2		13
6	Fungsional yang disetarakan	3		1
7	Fungsional	2		
7	Staf	12	9	21
	Jumlah	27	17	44

Tabel 1. 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, berdasarkan Pendidikan pada tahun 2022

No	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1	S-2	9	4	13
2	S-1	14	11	25
3	D-III	3	2	5
4	SMA	0	0	0
	Jumlah	27	17	44

Secara grafis, tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Grafik ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi didukung pula oleh tenaga non ASN, terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Jumlah Tenaga Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022

No	Pendidikan	Tenaga Ahli		THL		Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	S-1	3	0	5	3	11
2	D-III	0	0	2	0	2
3	D-II	0	0	1	0	1
4	SMA	0	0	4	1	5
	Jumlah	3	0	12	4	19

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

2.1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra adalah rencana jangka menengah yang disusun untuk menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat 1 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun renstra dengan berpedoman pada RPJMD. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah. Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

2017-2022 mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan RPJMD.

Pada tahun 2021 Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dilakukan perubahan pada Sasaran, Indikator dan Target Kinerja menyesuaikan RPJMD Perubahan. Tabel di bawah ini menyajikan Sasaran Strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Diskominfo Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Perubahan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Diskominfo Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Perubahan.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET RENSTRA PERUBAHAN 2018 -2022				
					2018	2019	2020	2021	2022
I	MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik								
1	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka	1,8	2,6	3,3	3,18	3,19
2	Meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral daerah	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	%	25	50	75	80	85
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	SAKIP	Indeks	B	BB	BB	BB	BB

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi 2017-2022

2.2. Visi dan Misi Kota Cimahi

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023–2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yaitu:

“CIMAHI KOTA CERDAS”

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari *Creative* yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; *Egalitarian* yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; *Religious* adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; *Developable* diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, *Accretive* diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta *Sustainable* adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi “CIMAHI KOTA CERDAS” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.

Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik.

Misi Empat : Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan

Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat

mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.

Misi Lima : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada: *pertama*, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; *kedua*, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta *ketiga*, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota.

2.2.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Diskominfo Kota Cimahi. Tujuan Diskominfo Kota Cimahi sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan e-Government
2. Meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral daerah
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Diskominfo Kota Cimahi merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran Diskominfo Kota Cimahi adalah:

1. Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik
2. Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

2.2.2. Strategi, Kebijakan serta Program

Strategi merupakan langkah untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan skala prioritas penanganan untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran. Strategi yang disusun Diskominfo Kota Cimahi sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo Kota Cimahi.
2. Meningkatkan jumlah Layanan Publik dan Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
3. Meningkatkan jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah.

5. Meningkatkan layanan persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
6. Meningkatkan kinerja organisasi.

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun, kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelenggaraan pendukung penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
2. Melaksanakan layanan infrastruktur teknologi informasi dan aplikasi yang handal dan sesuai kebutuhan.
3. Melaksanakan layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien serta melakukan penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat
4. Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan data statistik sektoral berbasis teknologi informasi.
5. Mewujudkan tata kelola manajemen persandian dan keamanan informasi yang efektif dalam mendukung terselenggaranya SPBE.
6. Mewujudkan Penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan.

Strategi, kebijakan yang telah ditetapkan akan dicapai melalui Program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
5. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi mempunyai tugas pokok, kewenangan dan tanggung jawab meliputi 3 (tiga) urusan, yaitu :

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika
- b. Urusan Persandian,
- c. Urusan Statistik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dituntut mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi sesuai dengan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 khususnya terhadap pencapaian msi ke 2 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**

Penyelenggaraan *e-government* melalui teknologi informasi dan komunikasi, Persandian serta pengelolaan data statistik sektoral daerah akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memudahkan implementasi transparansi, mendorong pemerintahan yang baik sekaligus mengurangi risiko korupsi.

IKU pada unit organisasi minimal adalah indikator kinerja output. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Ket.
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
2	Meningkatnya Tata Kelola Statistik Sektoral Daerah	Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	Nilai SAKIP Dinas	

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sesuai dengan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, terdiri dari :

- a. Perjanjian Kinerja Eselon II
- b. Perjanjian Kinerja Eselon III
- c. Perjanjian Kinerja Eselon IV dan
- d. Perjanjian Kinerja Fungsional yang disetarakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 ditetapkan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017-2022, Rencana Kerja Tahun 2022 serta dengan mempertimbangkan nilai anggaran yang dialokasikan. Perjanjian Kerja yang ditetapkan sebagai berikut :

2.2.1. Perjanjian Kinerja Eselon II

IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi merupakan indikator kinerja Kepala Dinas (eselon II) dengan target kinerja, meliputi seluruh urusan kewenangan, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,19
2	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sectoral	80 Persen
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	Nilai SAKIP	BB

2.2.2. Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu :

- i. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik.

Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Urusan Komunikasi dan Informatika pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	60 Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	Prosentase analisis berita yang berkonten positif	80 persen

b. Pranata Humas Sub Koordinator Layanan Hubungan Media

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Pranata Humas Sub Koordinator Layanan Hubungan Media Tahun 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui berbagai media	jumlah publikasi pemerintahan	3.530 Publikasi

c. Pengelola Media Center

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Pengelola Media Center Tahun 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya layanan informasi dan pengaduan masyarakat	prosentase permintaan layanan informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	60 persen
2	Terlaksananya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	jumlah berita pada website dan media lainnya	800 informasi

ii. Bidang Penyelenggaraan e-Government

Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Urusan Komunikasi dan Informatika pada Bidang Penyelenggaraan e-Government, sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Cakupan Pengembangan E-Government Daerah;	80 Persen;

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya penyelenggaraan domain dan sub-domain Pemerintah Kota Cimahi	Prosentase perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	90 Persen
1.2	Meningkatnya layanan TIK	Prosentase cakupan layanan TIK;	60 Persen;

b. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koodinator Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi

Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur Dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya layanan jaringan intra Pemerintah Kota Cimahi	Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK	90 Persen
2	Terlaksananya pengelolaan pusat data	Level Pengoperasian Pusat Data;	3 Level;
3	Terlaksananya penatalaksanaan e-government	Jumlah dokumen kebijakan TIK;	1 Dokumen

c. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 2. 9 Perjanjian Kinerja Perubahan Pranat Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengembangan Aplikasi Dan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun

2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengembangan sistem yang memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola	35 Aplikasi
2	Terlaksananya pengembangan Cimahi Kota Cerdas	Jumlah aktivitas pengembangan kota cerdas	3 aktivitas

2. Urusan Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh setingkat eselon IV pada Bidang Penyelenggaraan e-Government Perjanjian Kinerja Urusan Persandian sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government

Tabel 2. 10 Perjanjian Kinerja Perubahan Bidang Penyelenggaraan E-Government Dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	35 Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terselenggaranya pola hubungan komunikasi sandi antara PD Kota Cimahi	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	55 Persen
1.2	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan;	55 Persen

b. Kepala Seksi Persandian

Tabel 2. 11 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Persandian Dan Pengembangan Sumber Daya Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penggunaan komunikasi sandi	Jumlah penggunaan jaring komunikasi sandi	8 Perangkat Daerah
2	Terlaksananya pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah PD yang dilakukan asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian	8 Perangkat Daerah
3	Terlaksananya layanan keamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah layanan kemanan informasi yang dilakukan	10 Layanan

3. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh setingkat eselon IV pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik. Perjanjian Kinerja Urusan Statistik sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Tabel 2. 12 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Data Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data statistik daerah	65 Persen;

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral	Jumlah publikasi Data Statistik Kota Cimahi;	2 Publikasi

b. Kepala Seksi Statistik

Tabel 2. 13 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Data Dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
----	----------------------	--------------------------------	--------

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya koordinasi pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja	4 kali
2	Meningkatnya kualitas SDM pengelola data/statistik/informasi	Jumlah SDM pengelola data/statistik/informasi yang mengikuti pelatihan/pembinaan/pendidikan	60 Orang

4. Sekretariat

Sekretariat sebagai pelaksana layanan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Perjanjian kinerja Sekretaris dan eselon IV, sebagai berikut :

a. Sekretaris

Tabel 2. 14 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai LAKIP	76,65 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100 persen
1.2	Terselenggaranya administrasi penyelenggaraan barang milik daerah	Prosentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	75 persen
1.3	Tersedianya administrasi umum	Prosentase penyediaan administrasi umum	50 persen
1.4	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50 persen
1.5	Terpeliharanya barang milik daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	50 persen
1.6	Terfasilitasinya pembinaan pegawai	Jumlah Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan	48 Pegawai;

1.7	Terlaksananya administrasi keuangan	Prosentase administrasi keuangan terlaksana	100 persen
-----	-------------------------------------	---	------------

b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tabel 2. 15 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Program Dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 dokumen
2	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	2 dokumen
3	Terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	Prosentase ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	100 Persen
4	Terfasilitasinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan non ASN	Prosentase ASN dan non ASN yang terfasilitasi administrasi	100 Persen
5	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 bulan
6	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah bulan koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi	12 bulan
7	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun;	1 dokumen
8	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan dokumen tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	2 dokumen
9	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	17 dokumen
10	Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan prognosis	1 Dokumen

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2. 16 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pengamanan	5 unit

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor;	12 Bulan
3	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan;	12 Bulan
4	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor;	10 Set
5	Terfasilitasinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	120 Aktivitas
6	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan
7	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
8	Tersedianya layanan yang memenuhi kebutuhan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan perlengkapan kebersihan dan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan
9	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan	5 unit
10	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan
11	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	20 unit
12	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada seluruh pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	48 Pegawai;

2.3 Program/Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Perjanjian Kinerja dengan Penjelasan

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022 dilaksanakan melalui Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

- Anggaran Murni : Rp. 12.475.019.360,-
- Anggaran Perubahan : Rp. 13.628.765.680,-

Secara ringkas, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2. 17 Pagu anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun anggaran 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.833.656.260,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.448.500,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.378.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.070.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.222.069.760
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.208.866.760
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.203.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.200.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.200.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.700.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	5.700.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.829.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.194.600,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.493.400,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.072.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.069.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.566.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.010.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.856.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.843.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.255.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.588.000,00
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 2.384.057.700
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.384.057.700
	2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 241.904.800
	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Rp 136.960.000
	2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Rp 2.005.192.900
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.778.149.120,00
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.550.401.620,00
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.550.401.620,00
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.227.747.500,00
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	203.500.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	699.807.500,00
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	213.390.000,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	111.050.000,00
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 263.938.000
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 263.938.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Rp 236.750.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp 27.188.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	368.964.000,00
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	298.964.000,00
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62.500.000,00
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	236.464.000,00
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00
	TOTAL	Rp 13.628.765.080

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022 disajikan dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu organisasi. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Perjanjian kinerja yang telah dilakukan merupakan target yang diharapkan dapat dicapai pada akhir masa anggaran tahun berjalan.

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022 dilakukan terhadap target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022. Dan selanjutnya dilakukan perbandingan dengan target kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2021, serta target akhir tahun Rencana Strategis (Renstra) untuk melihat kecenderungannya dan kemungkinan ketercapaiannya pada masa akhir Renstra.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka memastikan adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator sasaran. Pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKIP dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan

pengukuran kinerja kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2022, yaitu:

- Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan/atau relatif (%).
- Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator jumlah kegiatan, jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang atau jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.

Formula pengukuran/penghitungan realisasi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Formula pengukuran/penghitungan realisasi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Didapat dari hasil Evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB
2	Meningkatnya Tata Kelola Statistik Sektoral Daerah	Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	Jumlah Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral/Jumlah Perangkat Daerah x 100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	Nilai SAKIP Dinas	Didapat dari hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Cimahi

Karakteristik indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menggambarkan pencapaian yang semakin baik dengan rumusan:

$$\text{persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja > 85% sampai dengan 100% = Sangat berhasil

2. Capaian kinerja > 75% sampai dengan 85% = Berhasil
3. Capaian kinerja > 55% sampai dengan 75% = Cukup berhasil
4. Capaian kinerja kurang dari 55% = Kurang berhasil

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan kolaborasi antara sumber-sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh organisasi. Sumberdaya organisasi antara lain sumber daya manusia atau personil organisasi mencakup kemampuan/kualitas intelektual dan berorganisasi dan kuantitasnya, kualitas dan kuantitas peralatan dan perlengkapan kerja, nilai anggaran yang dikelola, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta kebijakan-kebijakan yang mengatur dan berpengaruh baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam seluruh skala; struktur dan sistem manajemen dan operasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis; hubungan-hubungan organisasi formal dan informal baik dalam lingkup Pemerintah Kota Cimahi, instansi vertikal pemerintahan maupun dengan lembaga non pemerintahan; hubungan-hubungan dengan masyarakat, baik dalam skala individual maupun kelompok.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi pada tahun 2022, sesuai dengan dokumen Renstra Perubahan tahun 2017-2022 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sedangkan dokumen Perjanjian Kinerja Diskominfo Kota Cimahi Tahun 2022 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yang akan dicapai. Realisasi pada akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran dapat dicapai dengan sangat baik. Rata-rata capaian indikator dan evaluasi kinerja rata-rata sebesar 102% hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Diskominfo sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Strategis/IKU Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,19	3,09	97%	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
2	Meningkatnya Tata Kelola Statistik Sektoral Daerah	Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	85 %	93,33 %	110%	Sangat Baik
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	Nilai SAKIP Dinas	BB	BB	100%	Sangat Baik

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Hasil (outcome) dan Keluaran (output)

Capaian hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022 disajikan secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Hasil dan Keluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	7	9	10
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen cakupan Pengembangan E-Government Daerah	80	91	113,75%
I.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	86	100	116,63%
I.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK	90	100	111,11%
I.2.	Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen cakupan layanan TIK	50	100	200,00%
1.2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Level Pusat Data	3	5	166,67%
1.2.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah aplikasi yang dikelola	35	123	351,43%
1.2.3	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	aktivitas pengembangan kota cerdas	3	4	133,33%

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.2.4	Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100,00%
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persen Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	60	60	100,00%
II.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen analisis berita yang berkonten positif	80	100	125,00%
II.1.1	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	persen permintaan layanan informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	50	99,20	198,4%
II.1.2	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Publikasi pemerintahan	3.530	3.999	113,29%
II.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Berita pada website dan media lainnya	800	1.860	232,50%
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen ketersediaan data statistik daerah	65	93,33	143,58%
III.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	publikasi Data Statistik Kota Cimahi	2	2	100,00%
III.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	kali koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja	4	4	100,00%
III.1.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	SDM pengelola data/statistik/informasi yang mengikuti pelatihan/pembinaan/pendidikan	60	60	100,00%
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	35	100	285,71%
IV.1	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	55	75,46	137,20%
IV.1.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah penggunaan jaring komunikasi sandi	9	30	333,33%
IV.2	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	55	100	182,00%
IV.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang dilakukan asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian	8	19	237,50gf%

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
IV.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan kemanan informasi yang dilakukan	10	10	100,00%
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Nilai LAKIP	75,65	75,83	100,24%
V.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100	100	100,00%
V.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumenPerencanaan PD	2	2	100,00%
V.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD	2	2	100,00%
V.2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	75	75	100,00%
V.2.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	unit barang milik daerah yang dilakukan pengamanan	5	5	100,00%
V.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	12	12	100,00%
V.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BulanPenyediaan Logistik Kantor	12	12	100,00%
V.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan penyediaan cetakan dan penggandaan	12	12	100,00%
V.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Set peralatan dan perlengkapan kantor	10	10	100,00%
V.3.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aktivitas koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	120	120	100,00%
V.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	100,00%
V.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00%
V.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100,00%
V.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan penyediaan pelayanan umum kantor	12	12	100,00%
V.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan pemeliharaan barang milik daerah	12	12	100,00%
V.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan	5	5	100,00%

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
V.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan pemeliharaan gedung/kantor dan bangunan lainnya	12	12	100,00%
V.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	19	19	100,00%
V.6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PegawaiPegawai Yang terfasilitasi pembinaan	48	43	89,58%
V.6.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai yang mengikuti sosialisasi	48	43	89,58%
V.7	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen administrasi keuangan terlaksana	100	100	100,00%
V.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	29	29	100,00%
V.7.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12	12	100,00%

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah diamankan menjadi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dicapai melalui penyelenggaraan 5 (lima) Program. Capaian ke lima Program yang dilaksanakan pada tahun 2022 rata-rata sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berkaitan dengan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi yang terdiri dari:

1. Meningkatkan penyelenggaraan e-Government.

2. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.
3. Meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, dilaksanakan melalui Program. Terdapat 5 program yang mendukung pencapaian tujuan, berikut ringkasan capaian kinerja sasaran program yang dilaksanakan pada tahun 2022:

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2		3	7	9	10
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Persen cakupan Pengembangan E-Government Daerah	80	91	113,75%
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Persen Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	60	60	100,00%
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Daerah	Persen ketersediaan data statistik daerah	65	93,33	143,58%
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	35	100	285,71%
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Indeks Nilai LAKIP	75,65	75,83	100,24%

Realisasi kinerja tahun 2022 berdasarkan sasaran program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan diuraikan dalam sub bab berikut.

3.2.1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pertama

Evaluasi Sasaran 1 “ Meningkatkan penyelenggaraan e-Government”.
 Capaian indikator sasaran Meningkatkan penyelenggaraan e-Government adalah Cakupan Pengembangan E-Government Daerah dengan target 80 Persen realisasi pada program ini adalah 91% dengan demikian capaian kinerja untuk program Pengelolaan Aplikasi Informatika adalah 113,75%.
 Cakupan Pengembangan E-Government Daerah dihitung dengan

menggabungkan kinerja layanan pengelolaan infrastruktur teknologi dengan layanan pengembangan aplikasi dan layanan TIK. Realisasi sasaran pertama disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Sasaran Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Persen cakupan Pengembangan E-Government Daerah	80	91	113,75%

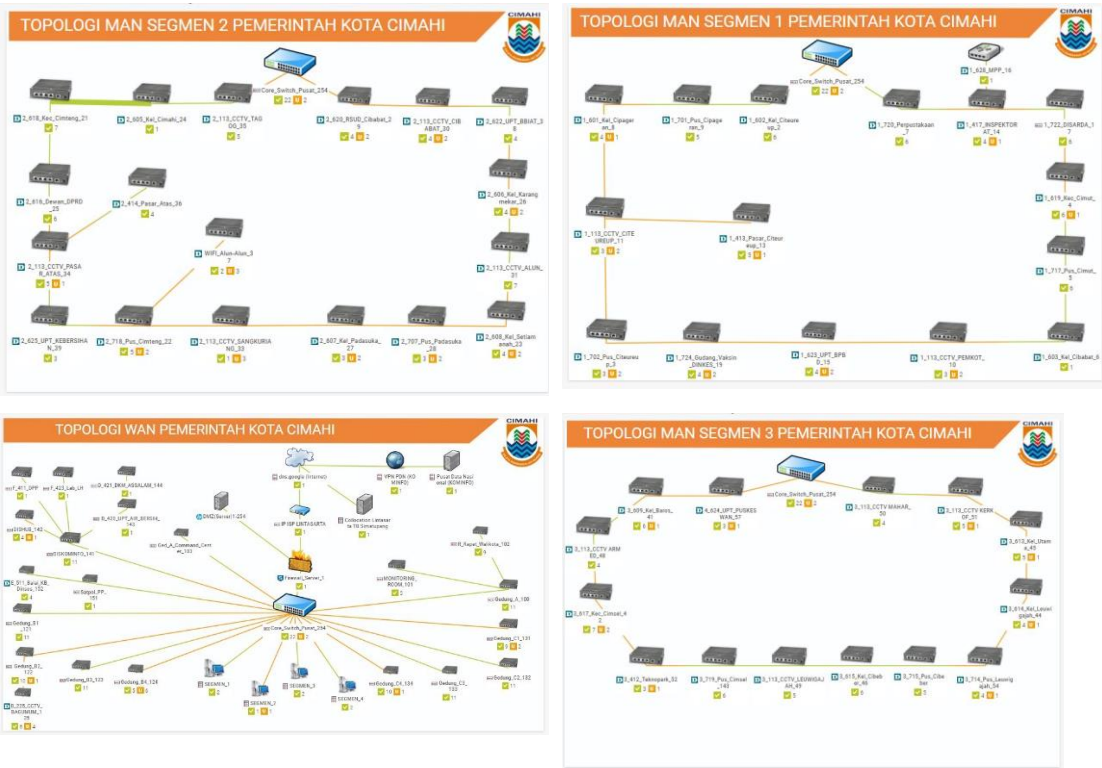
Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota indikator kinerja Kegiatan adalah prosentase perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id. Domain cimahikota.go.id merupakan domain resmi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk digunakan berbagai layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cimahi yang berbasis TIK. Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Cimahi dapat memanfaatkan domain tersebut untuk mengintegrasikan data dan layanannya yang diselenggarakan secara online. Saat ini seluruh Perangkat Daerah (30 perangkat daerah) yang telah menggunakan domain cimahikota.go.id sehingga capaian kinerja mencapai 116,27%. Saat ini terdapat 123 aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 52 layanan administrasi dan 71 layanan publik yang diselenggarakan secara online menggunakan domain cimahikota.go.id. (daftar layanan terlampir).
- 1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK dengan target kinerja tahun 2022 90%. Infrastruktur jaringan sistem informasi pemerintah Kota Cimahi dibangun dalam rangka mengintegrasikan seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Cimahi dalam sistem e-government Pemerintah Kota Cimahi.

Capaian indikator Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK pada tahun 2022 mencapai 100%, seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi jumlah Perangkat Daerah sebanyak 30 telah terlayani layanan infrastruktur jaringan TIK yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

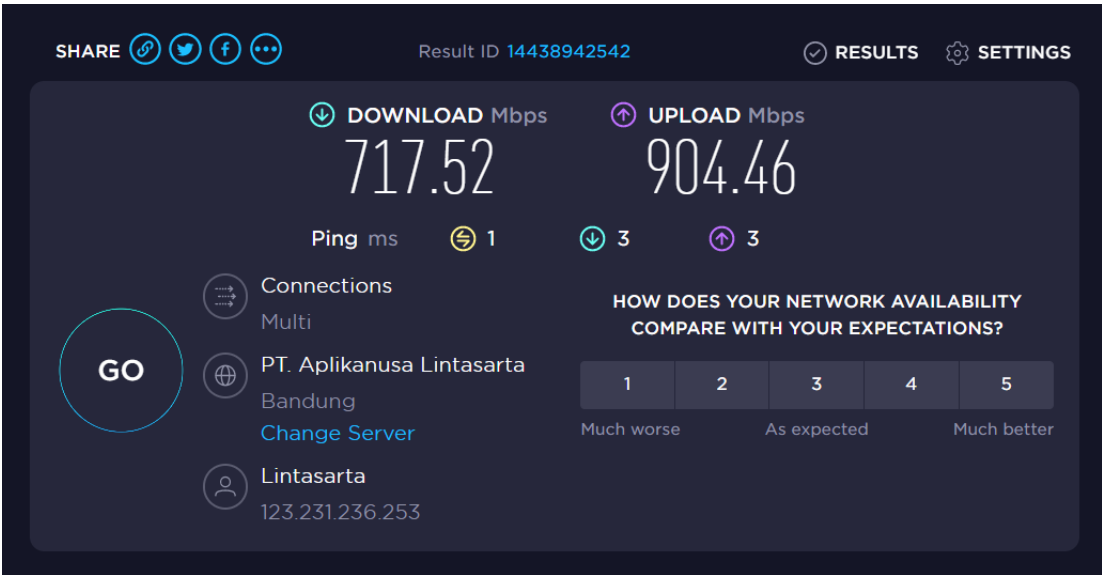
Kondisi jaringan Pemerintah Kota Cimahi jalur utama (*backbone* dan tulangan) transmisi sudah mencapai $\pm 140\text{km}$ tarikan fiber optic (fo), topologi jaringan wan menggunakan topologi ring terbagi menjadi 4 segmen menghubungkan DPRD, RSUD, Inspektorat, BPBD, 3 Kecamatan, 15 Kelurahan, 13 Puskesmas, Perpustakaan Umum, 9 UPT Dinas, menghubungkan 117 titik CCTV Satpol PP, Dinas Perhubungan dan CCTV pelayanan.

Penyediaan layanan internet untuk memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan layanan secara online terus menerus ditingkatkan kualitasnya

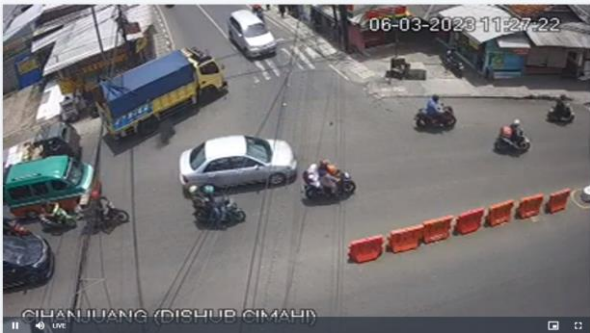


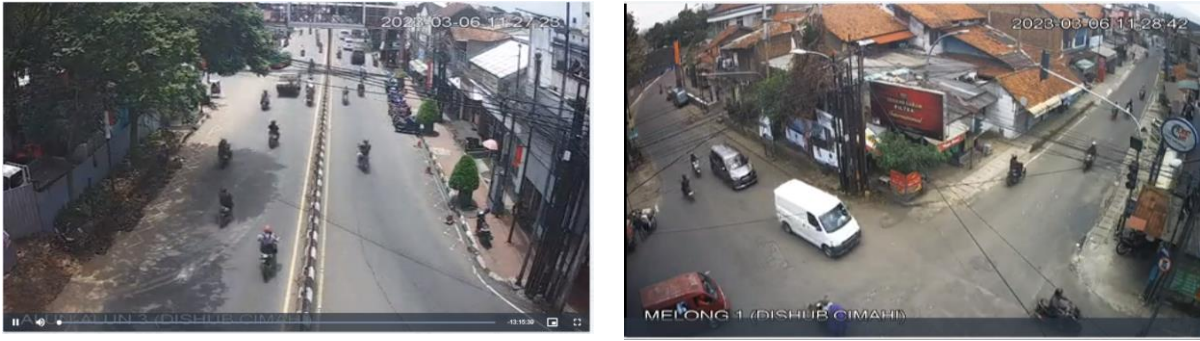
Gambar 3.1 Tipologi Wide Area Network dan Local Area Network yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

Pemanfaatan jaringan sampai dengan Tahun 2022 jumlah client setiap Perangkat Daerah maksimal sebanyak 255 dengan 1 gateway. Akses aplikasi e-government pemerintah kota cimahi (SIPD, SIPKD, Simkel, e-reporting, Simrenda, Simpeg, website, internet, dan lain-lain). Jalur komunikasi data (browsing, chatting, streaming, video conference, digital signage, transfer file dan cctv) dan Pelayanan publik (kependudukan, perizinan, lpse, pajak dan retribusi, puskesmas). Layanan akses internet Pemerintah Kota Cimahi saat ini kapasitas *bandwidth* 1.000 Mbps *dedicated* . Distribusi akses internet merata ke seluruh perangkat daerah yang terhubung melalui jaringan lan dan wan serta akses wifi di gedung Pemerintah Kota Cimahi sebanyak 8 titik.



Gambar 3. 2 Speedtest Internet Broadband yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi



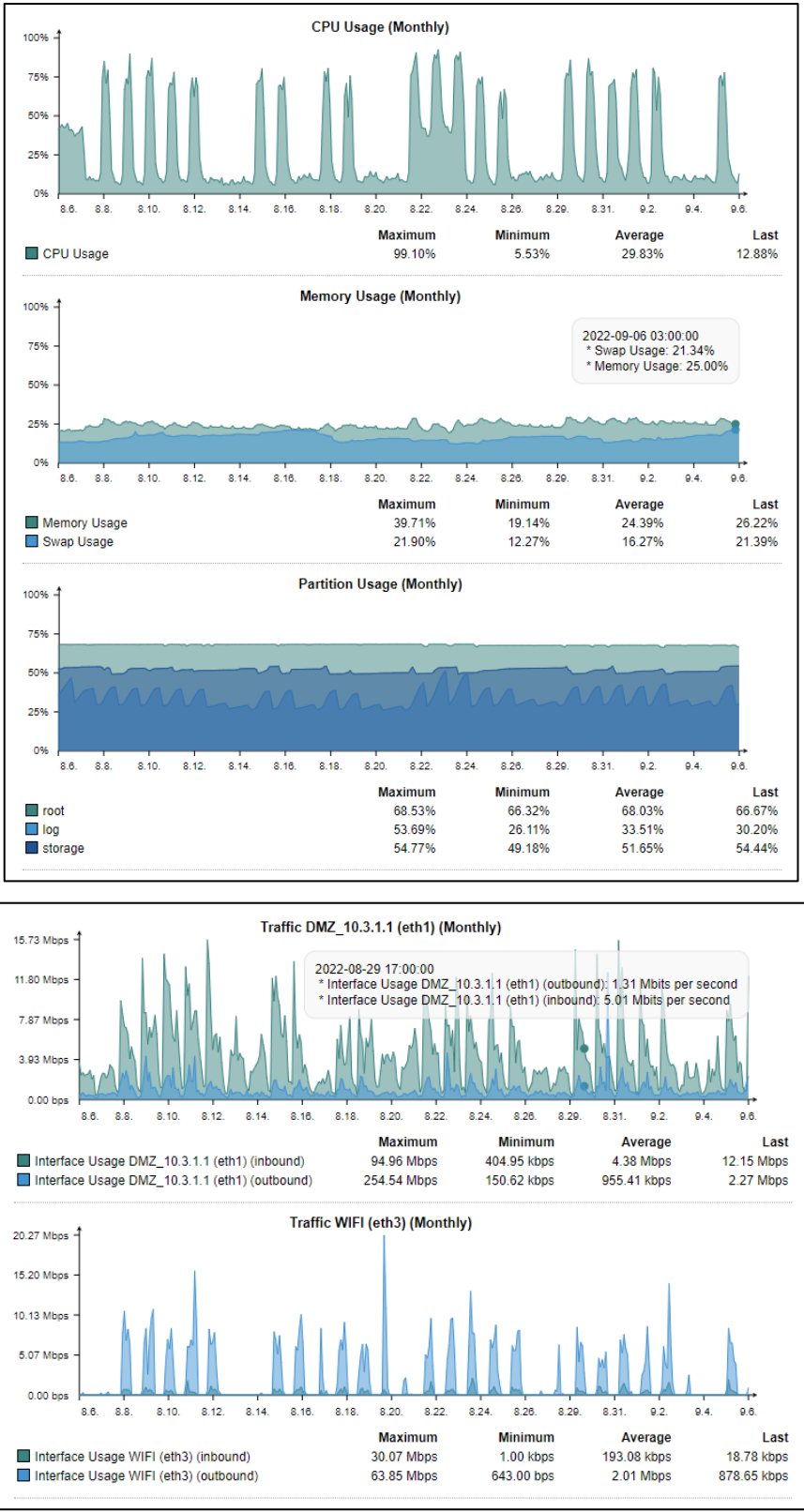


Gambar 3. 3 CCTV yang terhubung melalui jaringan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Realisasi cakupan layanan infrastruktur jaringan mencapai 100% dengan kata lain seluruh perangkat daerah sudah terhubung infrastruktur jaringan sehingga dapat menggunakan jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Capaian kinerja tercapai 100%.

Ruang lingkup sub kegiatan yang dilaksanakan dalam sub kegiatan ini adalah:

1. Pengeloaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan TIK Pemerintah Kota Cimahi (Pengelolaan Jaringan LAN dan WAN)
2. Penyediaan Jaringan Internet Pemerintah Kota Cimahi
3. Penyediaan Jaringan Internet Wifi di Ruang Publik
4. Penyediaan Jaringan Lastmile FO Jaringan WAN Kota Cimahi
5. Jasa Pemeliharaan Perangkat Aktif Jaringan LAN dan WAN
6. Fasiltasi vidio conference pimpinan
7. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
8. Pengadaan pendukung kegiatan lainnya.
9. Pengelolaan command center.

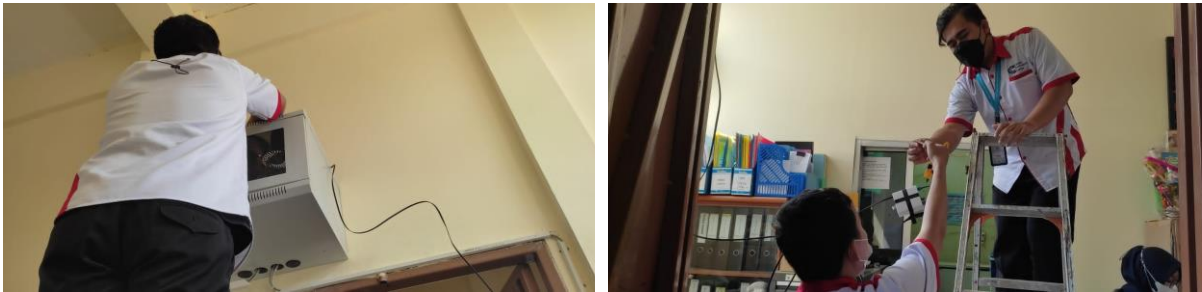


Gambar 3. 4 Monitoring jaringan WAN dan LAN





Gambar 3. 5 Fasitisasi video conference pimpinan



Gambar 3. 6 Pemeliharaan Perangkat Aktif Jaringan LAN dan WAN

2. Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 ini ditargetkan 50% cakupan layanan TIK, dalam kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yang mendukung pencapaian target pada kegiatan ini. Realisasi kegiatan pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 100% di mana capaian tersebut merupakan rata-rata capaian layanan Pengelolaan email resmi dinas (100), Pengelolaan domain dan sub domain (30 PD/ 30 PD x 100%), Pengelolaan hosting aplikasi 100%, Pendampingan pengembangan aplikasi 100%, Layanan pengembangan aplikasi 100%, layanan pemeliharaan aplikasi 100%, layanan backup database 100%, layanan backup aplikasi 100% dan layanan ticketing 100% telah terselesaikan.

Dari berbagai layanan yang telah dijelaskan dan telah diselesaikan pada tahun 2022 capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%. Pencapaian kinerja Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh kinerja sub kegiatan berikut:

2.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Level Pengoperasian Pusat Data dengan target tahun 2022 adalah level 3,

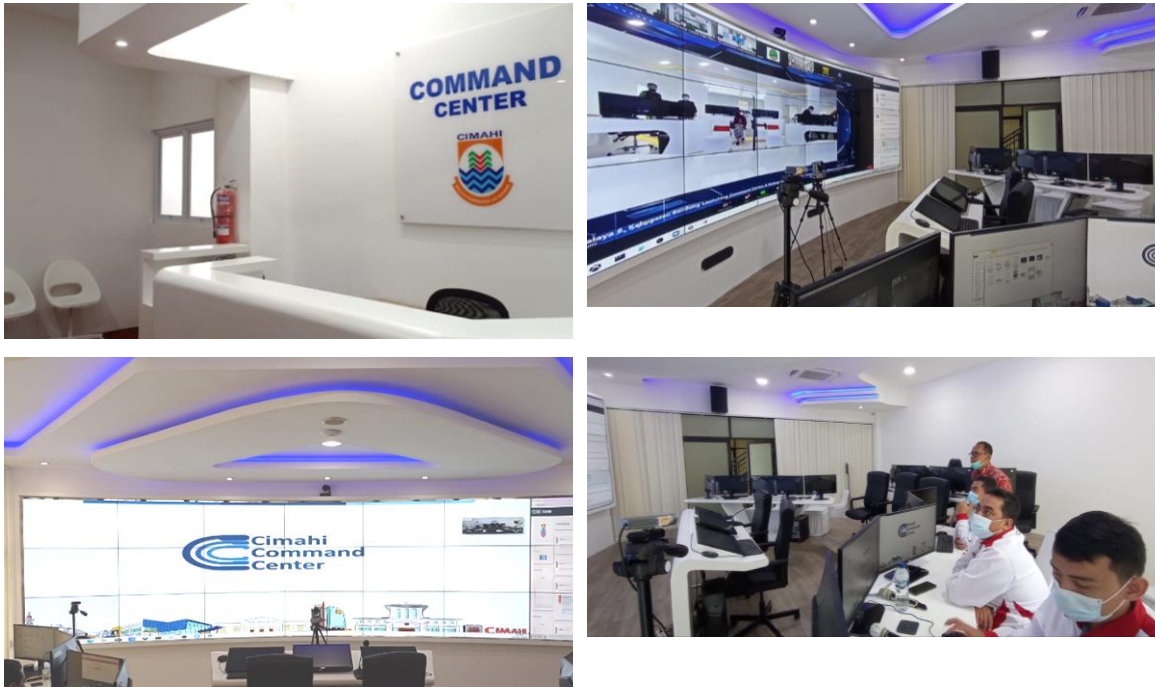
realisasi tingkat kematangan pengoperasian pusat data pada Pemerintah Kota Cimahi mencapai level 5 didapat dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PANRB pada tahun 2022.

Tingkat kematangan (*maturity*) pada level 5 memiliki arti bahwa pengoperasian pusat data berada pada tingkat **Optimum** Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.



Gambar 3. 7 Server Digunakan sebagai Pusat Data Elektronik Aplikasi Layanan Publik dan Administrasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam sub kegiatan ini dilaksanakan pengelolaan data center, operasional monitoring room, perpanjangan lisensi protokol keamanan jaringan, lisensi monitoring data center dan pengelolaan command center Kota Cimahi.



Gambar 3. 8 Command Center Kota Cimahi

2.2. Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Target Sub Kegiatan Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2022 adalah 1 buah dokumen Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dokumen yang Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government yang disusun sub kegiatan ini adalah penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana ini agar merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan implementasi SPBE dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 dan mengikuti Visi, Misi, Tujuan & Strategi SPBE Nasional serta berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu dengan melakukan reverse engineering terhadap parameter dari 47 indikator yang menjadi pokok dari evaluasi SPBE. Sehingga dapat dipastikan apa yang tertuang dalam kajian ini telah memenuhi dengan konteks evaluasi dalam SPBE. Dalam Arsitektur SPBE ini mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara Proses bisnis, Data dan informasi, Aplikasi SPBE,

infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung Oleh Manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan Tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah. Dengan tersusunnya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota Cimahi diharapkan dapat meningkatkan tata kelola implementasi SPBE di Kota Cimahi.

Arsitektur SPBE mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Keamanan Informasi dan Audit TIK dengan harapan agar Pemerintah Kota Cimahi dapat menghadirkan transformasi digital dalam layanan internal maupun publiknya.





Gambar 3. 9 Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Cimahi

2.3. Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Capaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Prosentase aplikasi yang dikelola pada tahun 2022 ini sangat tinggi mencapai 351,45%, saat ini terdapat 123 aplikasi yang dikelola yang terdiri dari 52 aplikasi layanan administrasi dan 71 aplikasi layanan publik yang diselenggarakan secara online.

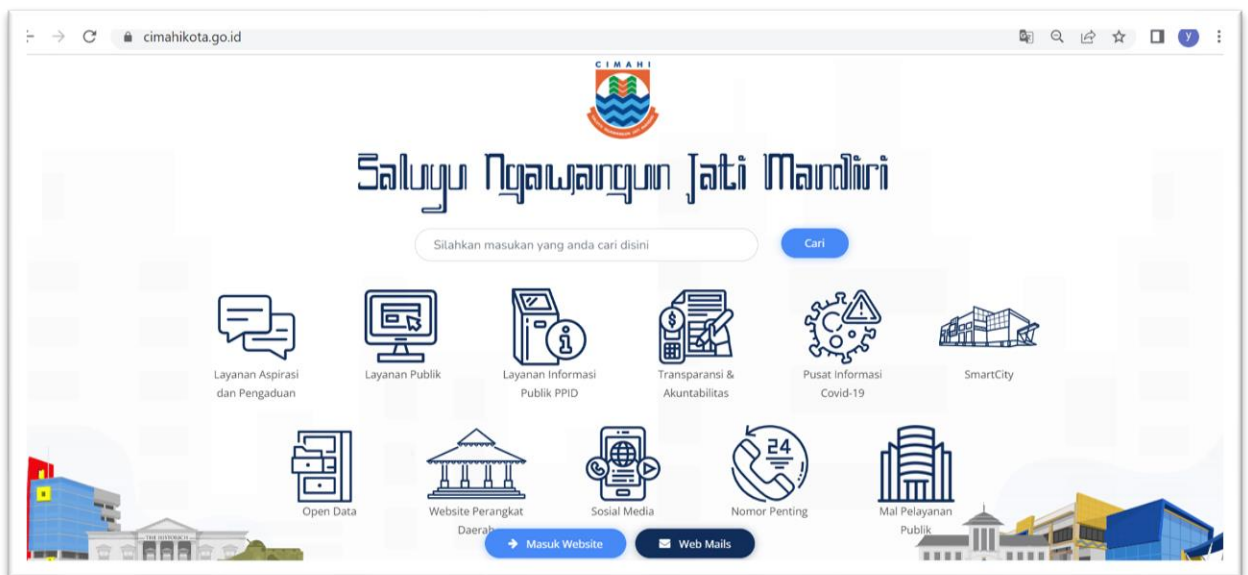
Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Pengelolaan dukungan teknis Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

pengelolaan website resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi merupakan kegiatan rutin dengan maksud untuk menjaga berjalannya media informasi bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam bentuk website resmi. Pengelolaan website dan dukungan teknis meliputi:

- Melakukan pengelolaan dukungan teknis website resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi
- Melakukan pengembangan dan perbaikan modul website resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi

- Melakukan pelatihan kepada pengguna website resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi yaitu Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik
- Melakukan *backup source code* aplikasi dan database website resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi
- Mengelola akun operator website dari Bidang IKPS
- Melakukan pengembangan website
- Melakukan *update* data website yang tidak bisa dikelola oleh Bidang IKPS
- Melakukan identifikasi data website yang dapat diintegrasikan dengan sistem lain



Gambar 3. 10 Website resmi pemerintah Kota Cimahi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

- b. Pengelolaan Domain dan Sub Domain Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Pengelolaan domain resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi (cimahikota.go.id) dan sub domain merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dengan melakukan pengelolaan domain serta sub domain yang ada di Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Pengelolaan domain ini meliputi domain utama dan sub domain beserta server *DNS (Domain Name System)*.

- Melakukan registrasi domain utama cimahikota.go.id ke Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Melakukan pengelolaan layanan aplikasi DNS

- Melakukan penambahan, perubahan dan penonaktifan sub domain
- Melakukan instalasi sertifikat protokol keamanan SSL (secure socket layer) pada sub domain yang diakses publik (melalui internet)
- Melakukan pemeriksaan dan pengetesan aplikasi pengguna sub domain
- Melakukan pemblokiran terhadap sub domain - sub domain yang terkena serangan keamanan
- Melakukan pemantauan keamanan sub domain

Tabel 3. 6 Data Penambahan Sub Domain Baru

No	Subdomain	Peruntukan	Perangkat Daerah
1	digitarmahi.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	Kelurahan Cimahi
2	esign-dev.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	Diskominfo
3	esign.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	Diskominfo
4	sadayapadu.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web / Pelayanan Publik	Disbudparpora
5	inawa.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web / Pelayanan Publik	DPKP
6	simbahrt.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web / Pelayanan Publik	DPKP
7	simdokling.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	DLH
8	siketanedu.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	Dispangtan
9	onguard.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	BPKAD
10	backend-interaktif-mpp.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	DPMPTSP
11	piramida.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web / Pelayanan Publik / Website	Bappelitbangda
12	dilandacita.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web / Pelayanan Publik	Disdukcapil
13	interaktif-mpp.cimahikota.go.id	Pelayanan Publik	DPMPTSP
14	sikemas.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	Kecamatan Cimahi Tengah
15	uptodate.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	BPKAD
16	sitangkal.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web / Website	DLH

No	Subdomain	Peruntukan	Perangkat Daerah
17	siomas.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	Bakesbangpol
18	sipengki.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	Kecamatan Cimahi Tengah
19	syantik.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web / Pelayanan	Kecamatan Cimahi Tengah
20	sibangdali.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web	Kecamatan Cimahi Tengah
21	sipaduumkm.cimahikota.go.id	Sistem Elektronik Berbasis Web / Pelayanan / Website	Kecamatan Cimahi Tengah

c. Pengadaan Tenaga Ahli Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi e-Government

Pengadaan Tenaga Ahli Senior Programmer, Programmer serta UI/UX Designer sangat dibutuhkan guna melakukan pengembangan aplikasi baru maupun modifikasi yang sudah ada. Tenaga Ahli Senior Programmer dan Programmer dapat ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan.

d. Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi e-Government

Melakukan pengembangan aplikasi baru sebagai berikut :

- Pengembangan aplikasi manajemen jadwal kegiatan SiJaKi (<https://sijaki.cimahikota.go.id>)
- Pengembangan aplikasi/website Single Window Cimahi (<https://single-window.cimahikota.go.id>)

Melakukan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi maupun website baik pengembangan baru maupun revitalisasi yang sudah ada, meliputi:

- Pemeliharaan website Pesduk (Pesan Singkat Penduduk) Kota Cimahi (<https://cimahikota.go.id>)
- Pemeliharaan website informasi Covid-19 Kota Cimahi (<https://covid19.cimahikota.go.id>)
- Pemeliharaan aplikasi Silatik (<https://silatik.cimahikota.go.id>)
- Pemeliharaan aplikasi *cloud storage* Cimahi Drive (<https://drive.cimahikota.go.id>)
- Pemeliharaan website Pemerintah Daerah Kota Cimahi (<https://cimahikota.go.id>)

- Pengembangan *web service* mantra untuk memenuhi kebutuhan organisasi

Pemeliharaan website Pemerintah Daerah Kota Cimahi (<https://cimahikota.go.id>)

Pendampingan terhadap aplikasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 sebagai berikut :

- Aplikasi Sipadu UMKM dari Kecamatan Cimahi Tengah yaitu aplikasi untuk pengelolaan data usaha UMKM
- Aplikasi Sitangkal dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu aplikasi untuk manajemen data laporan kerja tenaga harian lepas dan website untuk menampilkan informasi data pohon
- Aplikasi Dilanda Cita dari Disdukcapil yaitu aplikasi untuk memfasilitasi pengajuan dokumen administrasi kependudukan baik secara daring maupun luring
- Aplikasi Piramida dari Bappelitbangda yaitu aplikasi untuk manajemen data inovasi dan hasil kelitbangan
- Aplikasi Simdokling dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu aplikasi untuk pelayanan rekomendasi persyaratan penerbitan izin lingkungan kepada pemohon izin
- Aplikasi Inawa dari DPKP yaitu aplikasi untuk manajemen data penghuni rusun

Tabel 3. 7 Daftar Layanan Administrasi dan Layanan Publik yang dilaksanakan secara online di Pemerintah Kota Cimahi

No	Nama Aplikasi	URL	Klasifikasi Layanan
A. SISTEM INFORMASI			
1	APLIKASI PESDUK (PESAN SINGKAT PENDUDUK)	https://pesduk.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
2	APLIKASI PENGADUAN SP4N LAPOR	https://lapor.go.id (internet)	Layanan Publik
3	SISTEM INFORMASI LAYANAN TIK (SILATIK)	https://silatik.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
4	PORTAL OPEN DATA	https://data.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
5	APLIKASI MANAGEMENT INTEGRASI DAN PERTUKARAN DATA (MANTRA)	https://mantra.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
6	PORTAL SMART CITY	https://smartcity.cimahikota.go.id (internet) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cimahi.smartcity (play store) https://apps.apple.com/us/app/cimahi-smart-city/id1551570485 (app store) (internet)	Layanan Publik
7	SISTEM PENGELOLAAN EMAIL	https://webmail.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
8	SISTEM INFORMASI MONITORING JARINGAN	https://netmon.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan

No	Nama Aplikasi	URL	Klasifikasi Layanan
9	SISTEM INFORMASI MONITORING BANDWIDTH	https://prtgcimahirkota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
10	WEBSITE PPID KOTA CIMAHI	https://ppid.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
11	WEBSITE PUSAT INFORMASI COVID-19 KOTA CIMAHI	https://covid19.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
12	SISTEM MANAJEMEN DAN BERBAGI FILE BERBASIS CLOUD (CIMAHI DRIVE)	https://drive.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
13	SISTEM INFORMASI JADWAL KEGIATAN (SIJAKI)	https://sijaki.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
14	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INOVASI DAERAH (SID)	https://sid.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
15	APLIKASI PERPUSTAKAAN (INILIS)	https://library.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
16	E-LIBRARY	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsfoundry.eperpuswl.id.perpusda (play store) https://apps.apple.com/id/app/elib-kota-cimahi/id1418448526 (app store) (internet)	Layanan Publik
17	SISTEM INFORMASI ARSIP DINAMIS	https://arsipdinamis.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
18	SISTEM INFORMASI ARSIP DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)	https://srikandi.arsip.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
19	SISTEM INFORMASI ARSIP STATIS	https://arsipstatis.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
20	SIPKD ASET	http://sipkdaset.cimahikota.go.id (internet) http://sipkdfixaset.cimahikota.go.id (internet) http://sipkdpersediaan.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
21	SISTEM INFORMASI GAJI	https://simgajiweb.taspen.co.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
22	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN NP2D	http://np2d.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
23	SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)	https://cimahi.sipd.kemendagri.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
24	APLIKASI UPTUUPDATE	https://uptupdate.cimahikota.go.id/ (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
25	SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAERAH (SIMRENDAS)	http://simrenda.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
26	APLIKASI PUSAT INFORMASI RISET DAN MANAJEMEN INOVASI DAERAH (PIRAMIDA)	http://piramida.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
27	DIREKTORI BISNIS KOTA CIMAHI	http://dirbi.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
28	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASN KOTA CIMAHI (SIMAKCI)	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/simakci/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
29	SISTEM INFORMASI SKP ONLINE	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/skp-cimahi/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
30	SISTEM INFORMASI KINERJA ASN KOTA CIMAHI (SIKACI)	https://ekinerja.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
31	SISTEM CIMAHI ELEKTRONIK ABSENSI PNS (SICEKAS)	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/sicekas/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
32	SISTEM INFORMASI HUMAN CAPITAL CARE (E-HCC)	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/hcc/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
33	SISTEM INFORMASI KENAIKAN GAJI BERKALA DAN INPASI	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/kgb-cimahi/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
34	SISTEM KEHADIRAN BERLOKASI ASN CIMAHI (SIKONCI)	https://sikonci.cimahikota.go.id (internet) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SIKONCI&hl=in&gl=US (play store SIKONCI versi standar) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SIKONCILite (play store SIKONCI versi Lite)	Layanan Administrasi Pemerintahan
35	SISTEM INFORMASI DIKLAT	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/diklat/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
36	SISTEM ONLINE CUTI KOTA CIMAHI (SIONCOM)	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/sioncom/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan

No	Nama Aplikasi	URL	Klasifikasi Layanan
37	SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIR (SIBANGJAKA)	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/sibangjaka/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
38	SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)	https://sapk.bkn.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
39	SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)	(intranet)	Layanan Publik
40	APLIKASI DIGITALISASI LAYANAN ADMINDUK CIMAHI KOTA (DILANDACITA)	https://dilandacita.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
41	SISTEM INFORMASI KTP ELEKTRONIK (KTP-EI)	Desktop (intranet)	Layanan Publik
42	SISTEM INFORMASI PENDAPATAN (E-PAD)	https://epad.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
43	SISMIOP/SIM PBB	Desktop (intranet)	Layanan Publik
44	SISTEM INFORMASI BPHTB ONLINE	https://bphtb.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
45	SISTEM MONITORING PBB	https://pbbmon.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
46	SISTEM INFORMASI PEMERIKSAAN PBB (SIPRABU)	https://siprabu.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
47	SISTEM INFORMASI PUSKESMAS (SIMPUS)	Desktop (intranet)	Layanan Publik
48	SISTEM INFORMASI DOKUMEN LAPORAN ONLINE (SIIDOLA)	https://siidola.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
49	PORTAL LAYANAN KESEHATAN CIMAHI (SMART HEALTH)	https://pik.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
50	SIM INFORMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT	Desktop (intranet)	Layanan Publik
51	INACBG/E-KLAIM	Berbasis web intranet RSUD Cibabat	Layanan Publik
52	APLIKASI MANAJEMEN FILE PENUNJANG MEDIS	Berbasis web intranet RSUD Cibabat	Layanan Publik
53	APLIKASI ANDALAN RSUD CIBABAT (ANTRIAN MUDAH DAN LANCAR)	https://rsudcibabat.cimahikota.go.id/antri/daftar	Layanan Publik
54	SISTEM INFORMASI PPI, K3, SKP RSUD CIBABAT	Berbasis web intranet RSUD Cibabat	Layanan Publik
55	SISTEM INFORMASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT RSUD CIBABAT	Berbasis web intranet RSUD Cibabat	Layanan Publik
56	SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PERAWAT (SIKWAT)	Berbasis web intranet RSUD Cibabat	Layanan Administrasi Pemerintahan
57	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKREDITASI DAN INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT	Berbasis web intranet RSUD Cibabat	Layanan Administrasi Pemerintahan
58	SISTEM INFORMASI PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA (SIMKESBANG)	http://simkesbang.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Publik
59	SISTEM INFORMASI PENDATAAN KELUARGA	https://portalpk21.bkkbn.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
60	SISTEM INFORMASI POS YANDU (SIP)	http://sip.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
61	SISTEM INFORMASI PMKS	http://pmks.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
62	SISTEM INFORMASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (SIM PKB)	Desktop (intranet)	Layanan Publik
63	PENERIMAAN SISWA BARU ONLINE (PPDB ONLINE)	https://ppdb.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
64	DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
65	DATA POKOK PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS	https://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
66	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEHADIRAN	https://simak.cimahikota.go.id (internet) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cimahi.simak (play store) (internet)	Layanan Publik
67	SISTEM INFORMASI DPMPPTSP	Desktop (intranet)	Layanan Publik
68	DIGITAL SIGNAGE PERIZINAN	Desktop (intranet)	Layanan Publik
69	SISTEM INFORMASI PERIZINAN ONLINE (SIPINTER)	https://dpmpptsp.cimahikota.go.id/login/ (Internet)	Layanan Publik

No	Nama Aplikasi	URL	Klasifikasi Layanan
70	SISTEM SMS GATEWAY PERIZINAN	Desktop (intranet)	Layanan Publik
71	SIM IUMK	http://iumk.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
72	SISTEM INFORMASI AIR BERSIH (SIASIH)	https://siasih.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
73	SIM Pengelolaan Limbah Domestik	http://alddkp.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
74	SIM Pengelolaan Bank Sampah	https://simbah.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
75	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Taman (SIMANTAN)	https://simantan.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
76	SIM Kebudayaan dan Pariwisata	https://pariwisata.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
77	SIM KOMODITAS PASAR	https://uptpasar.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
78	LAPAKU	https://lapaku.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
79	APLIKASI PELAYANAN HAKI	https://hki.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
80	SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN CIMAHI TECHNOPARK (SMART CTP)	http://peminjaman.cimahitechnopark.id (Internet)	Layanan Publik
81	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATABASE INDUSTRI (SIMANTRI)	http://simantri.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
82	SISTEM INFORMASI TATA RUANG	https://sitarung.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
83	SISTEM INFORMASI TENAGA KERJA (CIMASISTAKER)	https://chimasistaker.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
84	SISTEM INFORMASI LINK AND MATCH	https://silima.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
85	SISTEM INFORMASI DATA KETENAGAKERJAAN DAN PELATIHAN TERINTEGRASI	https://sidakeptri.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
86	SISTEM INFORMASI LEGISLATIF EKSEKUTIF	https://silegeks.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
87	JDIH DPRD	http://jdih-dprd.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
88	SISTEM INFORMASI PUSAT KESEHATAN HEWAN (SIEMPUS)	http://siempus.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
89	SISTEM INFORMASI KETAHANAN DAERAH (SIHADE)	http://sihade.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
90	SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (E-REPORTING)	http://e-reporting.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
91	LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)	http://lpse.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
92	SIRUP	https://sirup.lkpp.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
93	E-MONEV	https://monev.lkpp.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
94	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIMADU)	http://simadu.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
95	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NASKAH DINAS AKTIF (SIMANDA)	http://simanda.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
96	SISTEM INTEGRASI DATA PENANGANAN PMKS DAN BAZNAS (SINTA PESONA)	http://sintapesona.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
97	WEBSITE JDIH PEMDA	http://jdih.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
98	SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SIKIP)	http://siakip.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
99	SISTEM INFORMASI KELURAHAN (SIMKEL)	http://simkel.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Publik
100	SISTEM INFORMASI KELURAHAN (SIMKEL)	http://simkel.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Publik
101	SISTEM INFORMASI DATA TERPADU UMKM (SIPADUUMKM)	https://sipaduumkm.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
102	SISTEM INFORMASI DATA TERPADU UMKM (SIPADUUMKM)	https://sipaduumkm.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
103	SISTEM TAMU WAJIB LAPOR (SITAWA)	https://sitawa.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
B. WEBSITE PERANGKAT DAERAH (MEDIA INFORMASI ELEKTRONIK RESMI)			

No	Nama Aplikasi	URL	Klasifikasi Layanan
1	WEBSITE PEMDA	https://cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
2	WEBSITE DISHUB	https://dishub.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
3	WEBSITE BAGIAN ORGANISASI SETDA	https://organisasi.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
4	WEBSITE DIDAGKOPERIN	https://disdagkoperin.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
5	WEBSITE DINAS KESEHATAN	https://dinkes.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
6	WEBSITE DISKOMINFO	https://diskominfo.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
7	WEBSITE BAPPENDA	https://bappenda.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
8	WEBSITE BKPSDMD	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
9	WEBSITE DPMPTSP	https://dpmptsp.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
10	WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	https://disdukcapil.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
11	WEBSITE DISBUDPARPORA	https://disbudparpora.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
12	WEBSITE DINAS PENDIDIKAN	https://disdik.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
13	WEBSITE CIMAHI TECHNOPARK	https://cimahitechNOPARK.id/ (internet)	Layanan Publik
14	WEBSITE DISNKAER	https://disnaker.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
15	WEBSITE SATPOLPP DAN DAMKAR	https://satpolppdamkar.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
16	WEBSITE BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI	https://bpkad.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
17	WEBSITE DINAS KEARSIPAN DAERAH KOTA CIMAHI	https://disarda.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
18	WEBSITE RSUD CIBABAT	https://rsudcibabat.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
19	WEBSITE DINAS LINGKUNGAN HIDUP	https://dlh.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
20	WEBSITE BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI	https://bpbd.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
21	WEBSITE KECAMATAN CIMAHI TENGAH	https://cimahitengah.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
22	WEBSITE KELURAHAN CIPAGERAN	https://cipageran.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik

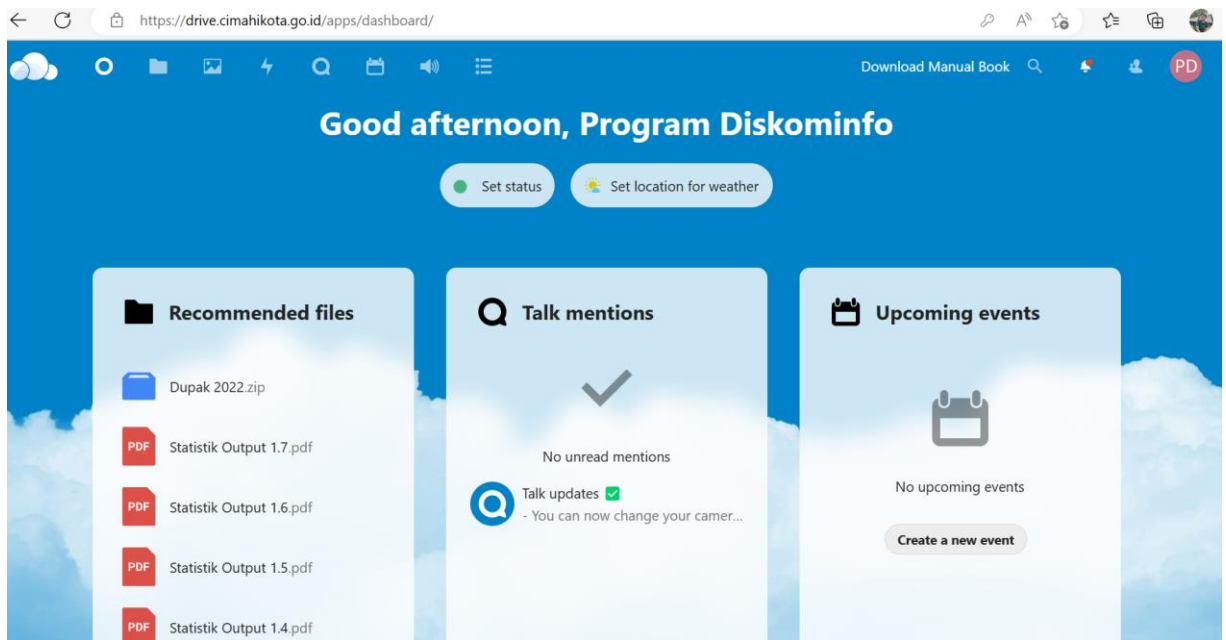
e. Fasilitas Integrasi Sistem Aplikasi e-Government

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan MANTRA bermaksud untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem penghubung layanan oleh Perangkat Daerah.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu untuk meningkatkan tata kelola dan penggunaan sistem penghubung layanan interoperabilitas di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta evaluasi kebijakan dan penggunaan SPLP untuk memperoleh masukan untuk penyusunan tata kelola yang lebih baik.

f. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Cimahi Drive

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Cimahi Drive yaitu dalam rangka pemanfaatan layanan sistem penyimpanan data/dokumen berbasis *cloud* serta untuk mengenalkan fitur-fitur dari aplikasi Cimahi Drive.



Gambar 3. 11 Penggunaan Aplikasi Cimahi Drive



Gambar 3. 12 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pemanfaatan Cimahi Drive bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

- 2.4. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas pada Tahun Anggaran 2022 menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan Kota Cimahi menjadi kota cerdas.

Target kinerja sub kegiatan Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas di tahun 2022 adalah Jumlah aktivitas pengembangan kota cerdas dengan target 3 aktivitas dan terealisasi 4 aktivitas sehingga capaiannya mencapai 133,33%.

Aktivitas pengembangan Kota Cerdas yang dilaksanakan terdiri dari:

a. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Masterplan *Smart City*.

Kegiatan evaluasi implementasi program *smart city* merupakan kegiatan rutin tahunan setelah penyusunan dokumen *masterplan smart city*. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, seluruh Perangkat Daerah serta komunitas dan perguruan tinggi di Kota Cimahi. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengukur dan menilai sejauh mana suatu daerah yang terpilih dalam Program Gerakan Menuju *Smart City* dan sudah menyusun *masterplan smart city* dapat mengimplementasikan rencana program *smart city* yang sudah disusun dalam dokumen *masterplan smart city*. Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan evaluasi tahun keempat sejak Kota Cimahi terpilih menjadi salah satu dari 100 kabupaten/kota dalam Program Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah berkaitan dengan program *smart city* di masing-masing Perangkat Daerah
- Melakukan rapat-rapat internal Tim Pelaksana Cimahi *Smart City*
- Menginventarisir dan mendata capaian program *smart city* di masing-masing Perangkat Daerah
- Melaksanakan evaluasi mandiri (*self evaluation*) sebanyak satu kali
- Melaksanakan evaluasi panel (*panel evaluation*) sebanyak satu kali

- Mengikuti pameran *smart city/ smart city expo* secara virtual.

Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) dimaksud, berdasarkan lima (5) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:

- a. *Baseline* (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen masterplan kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota, aktivitas dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*, dan realisasi program dan rencana aksi *smart city* di tahun sebelumnya.
- b. *Output* (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program *smart city*, untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, serta anggaran untuk program *smart city*.
- c. *Impact* (bobot 20%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi program *smart city*, untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan
- d. Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%), mencakup tingkat inovasi program percepatan *smart city*, untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pada program percepatan (*Quick Win*).
- e. *Outcome* (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di *masterplan smart city*, untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah.

Hasil penilaian dari lima dimensi tersebut dikategorikan menjadi dua (2), yakni:

- a. Indeks Pencapaian atau Rata-rata Bobot (*performance*) merupakan tingkat pembangunan *smart city* dari masing-masing daerah. Indeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata *Baseline*, *Output*, *Outcome*, *Impact*, dan *Quick Win*.
- b. Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) merupakan tingkat perbaikan yang terjadi pada tiap daerah setelah mengikuti Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*). Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) diperoleh dengan menghitung selisih antara rata-rata

Baseline, *Output*, *Outcome*, *Impact*, dan *Quick Win* terhadap nilai tahun lalu.

Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) dimaksud, dilengkapi dengan masukan dari para asesor yang mendeskripsikan beberapa poin kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota. Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas Kota Cimahi Tahun 2022 mendapat nilai final 3,48.

Tabel 3. 8 Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022 Kota Cimahi

Baseline	Output	Outcome	Impact	Quick Wins	Nilai Final	Tingkat Improvement
(10.00)	(20.00)	(30.00)	(20.00)	(20.00)		
3,8	3,25	3,64	2,99	3,81	3,48	0



Gambar 3. 13 Rapat Persiapan Evaaluasi Smart City 2022



Gambar 3. 14 Pemaparan Evaluasi Panel Program Smart City Tahun 2022 dilaksanakan secara daring diikuti oleh Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Masterplan Smart City.

- b. Keikutsertaan serta persiapan Seminar dan Pameran Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022.

Indonesia *Smart City Conference* dan *Smart City Expo* merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gerakan Menuju *Smart City*. Pelaksanaan Indonesia *Smart City Conference* bertujuan untuk membahas upaya pemanfaatan TIK dalam implementasi kota cerdas (*smart city*) yang dilanjutkan dengan pelaksanaan *awarding* kepada setiap Kepala Daerah atas pencapaian penyusunan *masterplan* dan implementasi program kota cerdas (*smart city*). Pada acara itu juga sekaligus dibuka untuk 2 minggu kedepan pelaksanaan *Smart City Expo* secara virtual yang diikuti oleh 144 kabupaten/kota peserta Gerakan Menuju *Smart City*.

Pelaksanaan Indonesia *Smart City Conference* dan Pameran *Smart City Expo* dilaksanakan pada bulan Oktober s.d. Desember 2022.

- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Program *Smart City*.

Peningkatan kapasitas SDM pengelola program *Smart City* ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan sumber daya manusia dalam hal teknologi informasi dan komunikasi terutama bidang sistem informasi.

Berikut merupakan data materi yang di berikan beserta peserta yang mengikutinya :

Tabel 3. 9 Nama Peserta dan Materi Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Program *Smart City*

No	Nama	Materi
1	Agustus Fajar Senjaya, AKS., MPSSp.	IT Governance Cobit 2019
2	Hadiyanto, ST	- Project Management (PMBOKv7) - Implementasi HadoopBigData
3	Puti Dina Fithria, ST.,ME	- Agile Development (1 - 2 Maret 2022) - Software Quality Assurance (24 - 25 Maret 2022)
4	Hygsan Iskandar, A.Md	- Software Quality Assurance (24 - 25 Maret 2022) - Progressive Web Application (28 - 30 Maret 2022)

d. Penyediaan Software Pendukung Untuk Pengembangan Aplikasi *Smart City*

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang ada di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Layanan TIK. Kegiatan pengadaan barang dan jasa ini meliputi penyediaan *oftware Task Management* menjadi suatu hal yang diperlukan untuk mengelola tugas-tugas pada Pengembangan Aplikasi, dan Pengadaan Lisensi *Software UI/UX Designer*

3.2.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analis Capaian Kinerja Kedua

Evaluasi Sasaran 2 “Meningkatnya informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien”

Capaian sasara kedua Program Informasi dan Komunikasi Publik, diselenggarakan oleh Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, Capaian kinerja program ini didukung oleh pelaksanaan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Indikator kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik di Tahun 2022 adalah Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah dengan target 60 %, saat ini layanan infromasi pemerintah daerah diselenggarakan melalui berbagai sub kegiatan dan berbagai kanal publikasi. Kanal yang

digunakan dalam publikasi untuk menyampaikan informasi pemerintah daerah antara lain, website resmi <https://cimahikota.go.id>, media cetak, media online dan media sosial. Dengan adanya berbagai media yang digunakan dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan daerah dapat lebih efektif dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang menjadi sasaran penyampaian pembangunan daerah. Realisasi Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah pada tahun 2022 sebesar 60% sehingga capaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik mencapai 100% seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 10 Target dan Realisasi Sasaran Program Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Tahun 2022

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
II	Meningkatnya informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Persen Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	60	60	100,00%

Pencapaian kinerja outcome Program Informasi dan Komunikasi Publik didukung melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

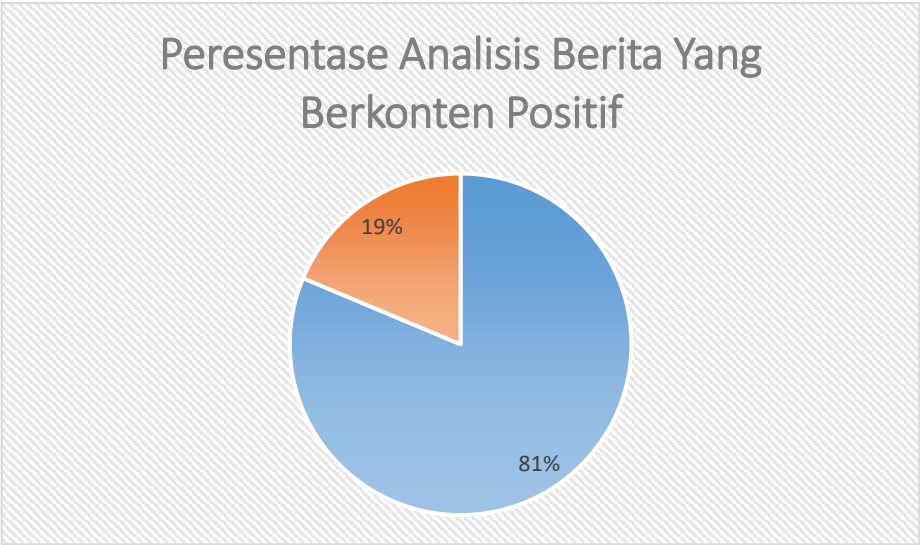
Target Indikator kegiatan ini adalah Persentase analisis berita yang berkonten positif, untuk mengetahui berita berkonten positif atau negatif dilakukan analisis berita terhadap artikel atau berita dari berbagai media. Analisa berita yang dilakukan pada tahun 2022 ini dilaksanakan terhadap 10 media massa cetak lokal dan nasional. Suatu berita dikategorikan sebagai berita positif apabila peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dan menyampaikan berita positif tentang pembangunan pemerintah daerah yang dilaksanakan sedangkan berita negatif peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dalam program pemerintah.

Dari hasil analisis berita yang dilaksanakan pada Tahun 2022 berita positif yang dianalisis sebanyak 1.764 berita, berita negatif sebanyak 405 berita, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Jumlah Analisis Berita

Analisis Berita	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Berita Positif	134	133	130	144	125	170	123	99	171	195	184	156	1.764
Berita Negatif	10	27	31	21	27	66	45	8	35	65	33	37	405
Jumlah Berita	144	160	161	165	152	236	168	107	206	260	217	193	2.169

Kesimpulan hasil analisis berita pada Tahun 2022, 81,33% hasil analisis berita bersifat positif sedangkan target tahun 2022 sebesar 80% berita berkonten positif sehingga capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100%.



Gambar 3. 15 Hasil Analis Berita Tahun 2022

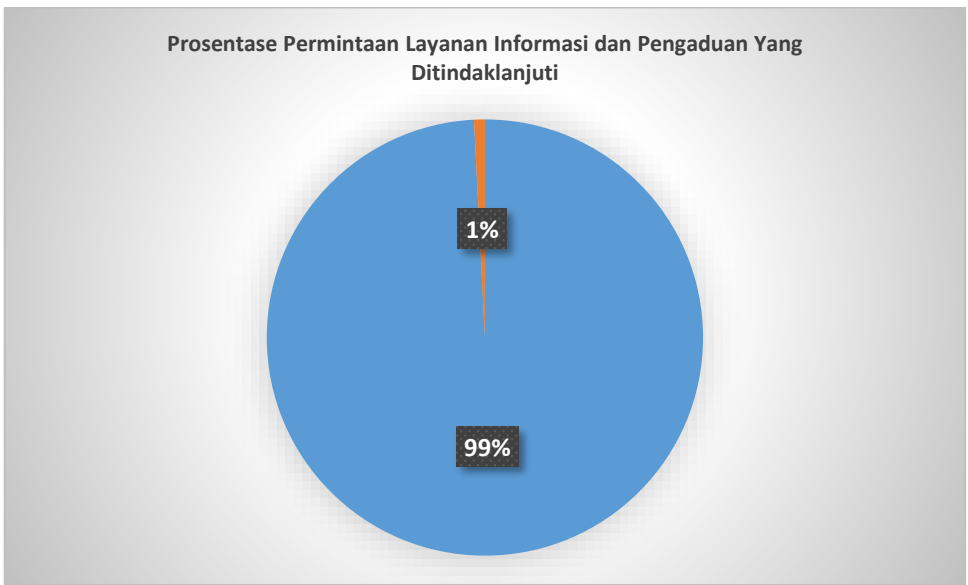
2.1. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan pengelolaan informasi daerah. Target kinerja sub kegiatan ini adalah Prosentase permintaan layanan informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 50% realisasi 99,20%. Selama tahun 2022 terdapat 125 permintaan layanan informasi dan pengaduan, dari jumlah tersebut 124 telah ditindaklanjuti dan 1 diteruskan. Seluruh permohonan informasi dan pengaduan diproses sesuai dengan SOP yang ada, selanjutnya pengaduan diteruskan kepada dinas teknis untuk ditindaklanjuti

sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya. Secara prosentase sebesar 99,20% pelayanan informasi dan pengaduan telah ditindaklanjuti, capaian kinerja ini melebihi target yang ditetapkan dalam perencanaan yaitu 50% sehingga capaian kinerja mencapai 198,4%

Tabel 3. 12 Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2022

No	Bulan	Ditindaklanjuti	Diteruskan	Total	Persentase yang ditindaklanjuti
1	Januari	5	0	5	100,00%
2	Februari	7	0	7	100,00%
3	Maret	14	0	14	100,00%
4	April	5	0	5	100,00%
5	Mei	7	0	7	100,00%
6	Juni	15	0	15	100,00%
7	Juli	8	0	8	75,00%
8	Agustus	11	0	11	100,00%
9	September	11	0	11	100,00%
10	Oktober	9	0	9	100,00%
11	November	15	0	15	100,00%
12	Desember	17	1	18	94,44%
Jumlah		124	1	125	99,20%

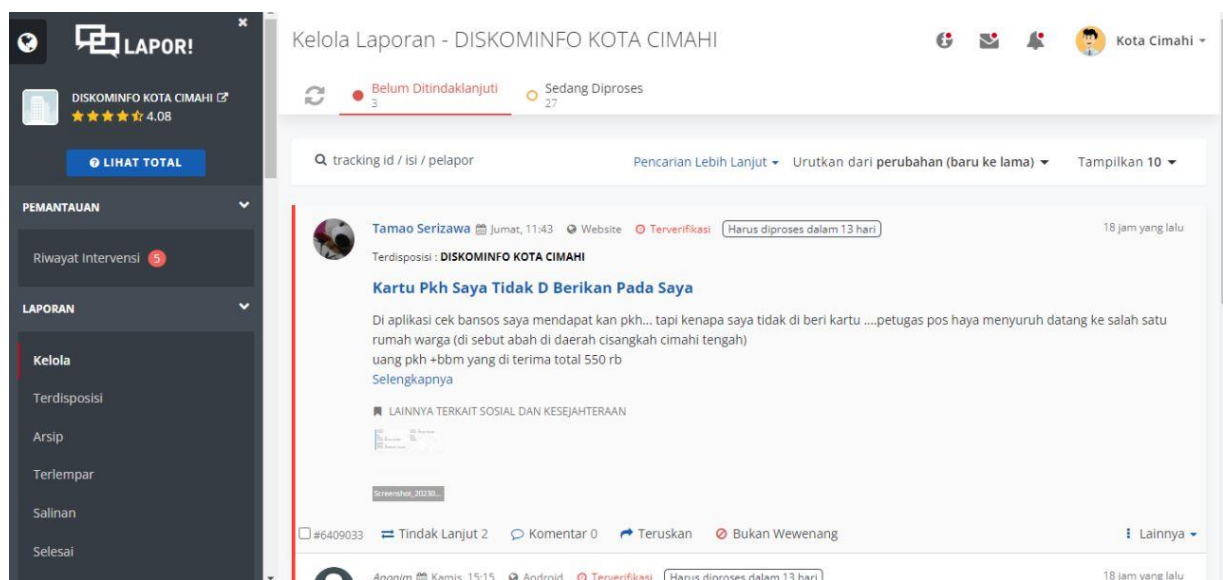


Gambar 3. 16 Prosentase Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2022

Perminataan layanan informasi dan pengaduan masyarakat dilayani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan

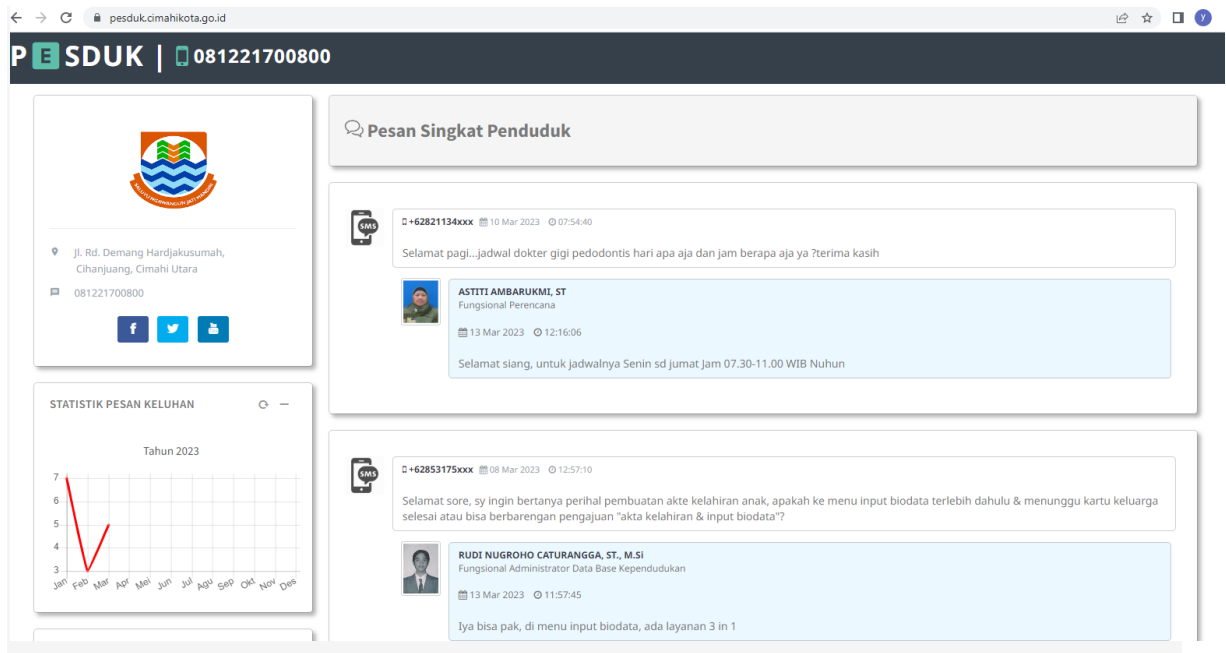
SP4N-LAPOR adalah Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! dan Pesduk. Melalui aplikasi tersebut masyarakat Kota Cimahi dapat menyampaikan semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia seperti yang tersebut di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Dasar hukum Pelayanan publik ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan dan ditingkatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, sehingga diperoleh pengelolaan pelayanan publik yang baik.



Gambar 3. 17 Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Selain itu penyampaian pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat melalui SMS/pesan singkat melalui nomor telepon 0812 2170 0800, layanan ini dikenal dengan Pesduk (pesan singkat penduduk).



Gambar 3. 18 Layanan Pesan Singkat Penduduk (PESDUK).

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Monitoring, evaluasi dan pemeringkatan Keterbukaan Infomasi Badan Publik Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Penilaian Independen Monev Keterbukaan Infomasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Melalui Monev 2022 ini, untuk memperoleh gambaran sebagai berikut:

Pertama, penerapan UU KIP terkait informasi publik pada masa pandemi terhadap Badan Publik di Jawa Barat khususnya Pemda Kab/Kota.

Kedua, memberikan dorongan kepada Badan Publik untuk lebih transparan dan akuntabel terkait pelaksanaan penerapan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pada masa pandemi.

Ketiga, memenuhi hak atas informasi masyarakat dalam mewujudkan negara yang menjunjung demokrasi yang sehat.

Keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah informasi hoak pada masa pandemi.

Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2022 nilai yang dicapai oleh Pemerintah Kota Cimahi 73 %, nilai tersebut menunjukkan predikat Cukup Informatif, dengan rincian hasil masing-masing nilai variabel hasil evaluasi sebagai berikut:

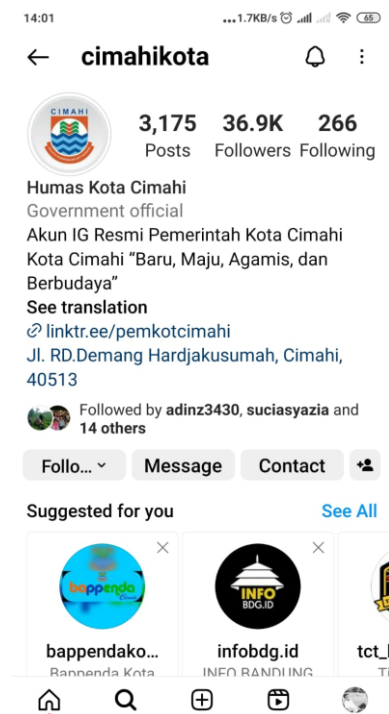
1. Eksistensi Kelembagaan PPID : 63%
2. Standar Pelayanan Informasi Publik : 63%

3. Ketersediaan Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala : 79%
4. Ketersediaan Informasi yang Wajib Diumumkan Setiap Saat : 68%
5. Ketersediaan Informasi yang Wajib Diumumkan Serta Merta : 94%

2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

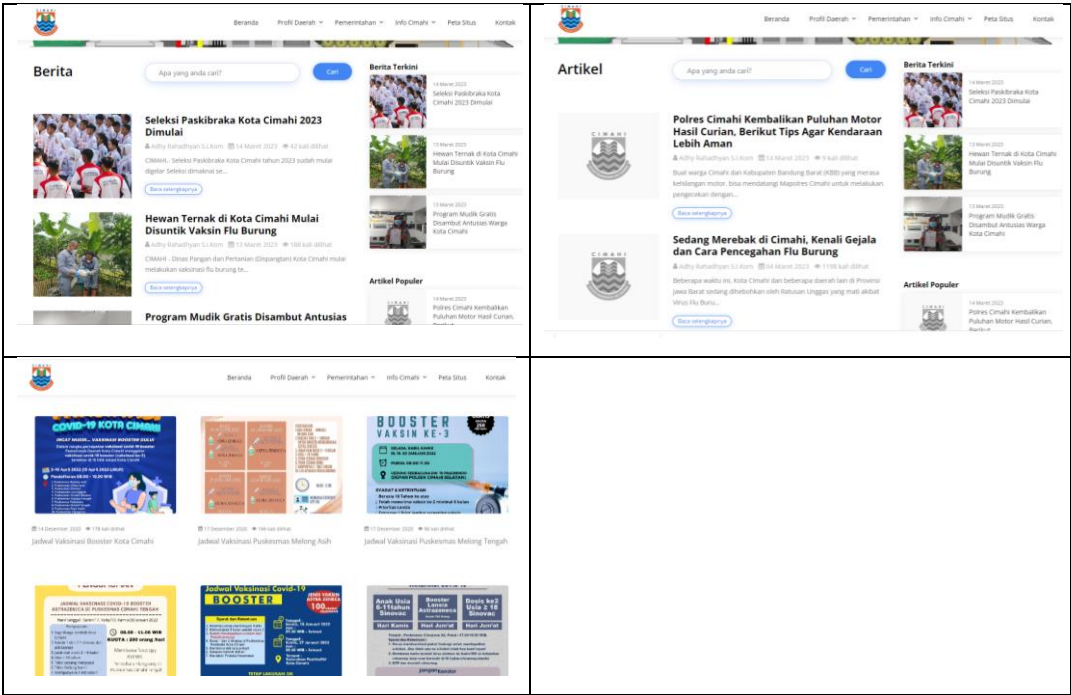
Pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik bertujuan untuk menyampaika berita berkaitan dengan program-program pembangunan daerah. Agar berita pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi tersampaikan dengan efektif dilakukan melalui berbagai media komunikasi sebagai berikut:

1. Media sosial, Instagram menjadi salah satu pilihan media yang digunakan dengan sasaran penyebaran informasi bagi kalangan usia remaja yang sudah terbiasa dengan penggunaan Media Sosial. Username Instagram resmi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah @cimahikota.



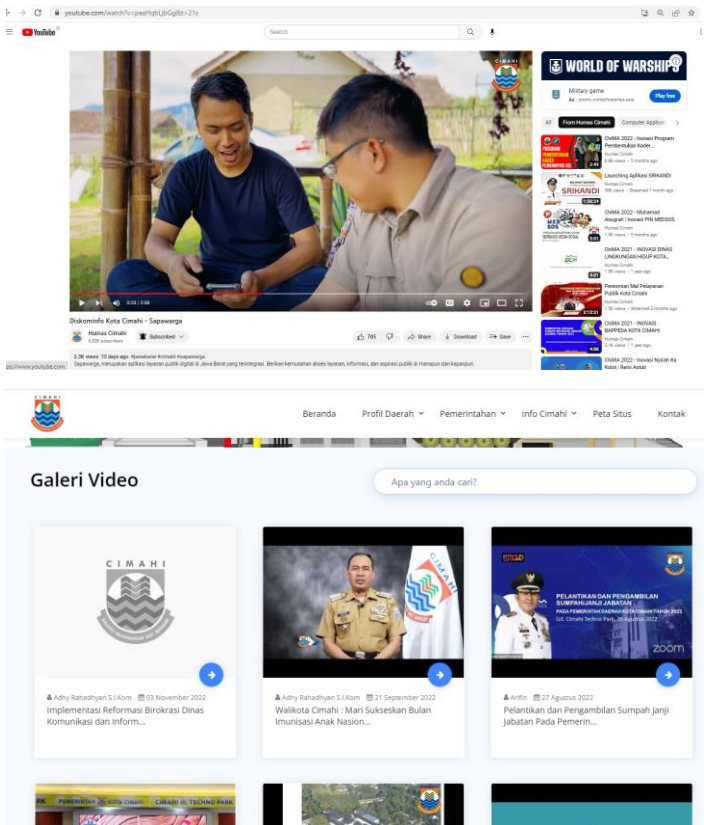
Gambar 3. 19 Instagram resmi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

2. Pengelolaan konten berita website <https://www.cimahikota.go.id> dalam bentuk modul berita, sliding banner, infografis dan lainnya.



Gambar 3. 20 Pengelolaan konten berita website cimahikota.go.id

3. Pembuatan bahan publikasi melalui media sosial: Instagram (@cimahikota) dan Facebook (Pemerintah Kota Cimahi).
4. Video publikasi disampaikan melalui website cimahikota.go.id dan chanel youtube humas Cimahi.



Gambar 3. 21 Publikasi video melalui chanel youtube humas Cimahi dan cimahikota.go.id

Indikator kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan Media Publik Jumlah berita pada website dan media lainnya, target pada tahun 2022 adalah 800 berita, selama tahun 2022 berita yang dibuat dan disampaikan dalam website resmi dan media lainnya (Media social, instragam, facebook dan twitter) sebanyak 1.860 konten atau berita dalam bentuk berita, artikel, video, konten media sosial, infografis dan lainnya, sehingga capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan 232,50%.

Tabel 3. 13 Rincian Berita Pada Website Dan Media Lainnya

No	Publikasi	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jml
1	Media Sosial	45	49	49	72	47	50	52	38	45	51	57	52	607
2	Berita dan Artikel	24	24	31	28	22	33	29	27	11	39	36	60	364
3	Pengumuman dan Dokumen Dinas	8	165	48	1	1	4	3	2	13	15	12	8	280
4	Sliding Banner	6	5	5	6	8	8	6	4	6	6	2	1	63
5	Infografis Covid - 19	34	56	69	79	53	27	70	75	0	0	0	51	514
6	Publikasi Youtube	0	0	0	1	0	3	0	1	23	0	1	3	32
Jumlah		117	299	202	187	131	125	160	147	98	111	108	175	1860

2.3. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaa sub kegiatan Layanan Hubungan Media adalah Menyebarluaskan informasi (publikasi) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Cimahi selama Tahun Anggaran 2022 melalui kerjasama dengan media dan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui publikasi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Cimahi bahwa pelaksanaan pembangunan dilaksanakan demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Target kinerja sub kegiatan Layanan Hubungan Media adalah Jumlah publikasi pemerintahan dengan target 3.530 publikasi

Publikasi dilakukan melalui:

1. Publikasi melalui press release.
2. Publikasi melalui artikel di media cetak.
3. Publikasi melalui artikel di media online.
4. Iklan Display.
5. Publikasi Advertorial di SKH/SKM/Majalah.
6. Publikasi Advertorial di Media Online.

- Publikasi Advertorial di Media Televisi.
- Publikasi melalui Talk show.
- Publikasi melalui media luar ruang.



Gambar 3. 22 Publikasi Talkshow/Advertorial/Liputan/Reportase TV/Radio

Tabel 3. 14 Publikasi pemerintahan daerah melalu berbagai media

No	Acara	Media	Bahan publikasi
1.	Grand launching MPP	AK TV	Hadirnya MPP Kota Cimahi menjadi bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. MPP Kota Cimahi dirancang agar dapat memenuhi harapan masyarakat, termasuk penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang memadai dan nyaman, di antaranya dengan memberikan kemudahan akses, ketersediaan parkir, fasilitas bagi anak dan ibu menyusui, ruang tunggu yang nyaman, fasilitas bagi disabilitas, perpustakaan mini, musholla, dan kantin. Selain sarana prasarana MPP yang bersifat fisik, MPP Kota Cimahi juga menyediakan sistem informasi layanan yang mengintegrasikan layanan di MPP. Seluruh kegiatan pelayanan publik kini dipusatkan di MPP Kota Cimahi, termasuk juga pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintahan pusat, BUMN, BUMD, instansi vertikal. Tak cukup sampai disitu, Pemerintah Kota Cimahi juga akan terus meningkatkan kualitas layanannya. MPP Kota Cimahi menyediakan layanan antrian, informasi dan pengaduan, termasuk survei kepuasan masyarakat bagi semua unit layanan di MPP. Semua layanan tersebut dibuat secara elektronik sehingga layanan menjadi lebih efisien. MPP diharapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat dan bahkan dapat menjadi ikon Kota Cimahi khususnya dalam pelayanan publik dan pembangunan ekonomi masyarakat. Dibangun di lahan seluas 8.786 m2 dengan total luas bangunan sebesar 8.934 m2, MPP Kota Cimahi yang berada di Jalan Aruman Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi menjadi MPP ke-77 di Indonesia dan MPP ke-11 di Provinsi Jawa Barat. MPP Kota Cimahi secara keseluruhan dibangun dengan dana dari APBD Kota Cimahi. MPP Kota Cimahi menghadirkan 159 layanan dari 39 instansi pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, dan asosiasi. Adapun rincian instansi yang bergabung yaitu 19 instansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan 23 instansi vertikal, BUMN, BUMD, swasta dan profesi Masyarakat Kota Cimahi dapat berkunjung untuk mengurus layanan perizinan dan non-perizinan setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-14.00 WIB. Layanan informasi MPP Kota Cimahi juga dapat diakses melalui alamat https://mpp.cimahikota.go.id/.
2.	Grand launching MPP	I News TV Bandung	
3.	Grand launching MPP	Bandung TV	
4.	Grand launching MPP	SCTV Bandung	
5.	Grand Launching MPP	MNC TV Jawa Barat	
6.	Grand Launching MPP	RCTI Jawa Barat	
7.	Grand Launching MPP	Mix FM	

Selama tahun 2022 Jumlah publikasi yang dilaksanakan sebanyak 3.999 Publikasi, dengan demikian capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 3.530 publikasi dengan demikian capaian kinerja pada sub kegiatan Layanan Hubungan Media pada tahun 2022 sebesar 232,50%.

Tabel 3. 15 Rekapitulasi Bulanan Publikasi Tahun 2022

NO.	Bulan	Jumlah Publikasi
1	Januari	279
2	Pebruari	279
3	Maret	341
4	April	298
5	Mei	398
6	Juni	360

7	Juli	158
8	Agustus	344
9	September	351
10	Oktober	232
11	November	463
12	Desember	496
Jumlah		4.449

3.2.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analis Capaian Kinerja Ketiga

Evaluasi Sasaran 3 “ Tersedianya Data Statistik Daerah”

Penyelenggaraan urusan wajib Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi diselenggarakan oleh Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik dan secara teknis dilaksanakan oleh Seksi Statistik pada tingkat eselon IV. Untuk menyelenggarakan satu urusan apabila dilihat dari beban pekerjaan dan rentang kendali yang hanya dilaksanakan oleh tingkat eselon IV masih belum optimal, demikian juga dukungan anggaran yang dialokasikan untk menyelenggarakan urusan statistik. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 untuk menyelenggarakan urusan statistik sebesar Rp. 263.938.000. Namun demikian dengan segala keterbatasan tersebut pencapaian target penyelenggaraan urusan statistik secara umum dapat dicapai dengan baik. Berikut capaian sasaran urusan ststistik:

Tabel 3. 16 Target dan Realisasi Sasaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Tahun 2022

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
III	Tersedianya Data Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data statistik daerah	65	93,33	143,58%

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan statistik adalah memastikan ketersediaan data statistik daerah sebagai bahan anlisis untuk mendukung pengambilan kebijakan-kebijakan strategis dan mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan. Ketersediaan data statistik daerah sangat bergantung dari peran aktif seluruh perangkat daerah dalam

melakukan pengisian dan pemutakhiran data statistik yang berkaitan dengan sektor masing-masing. Pada tahun 2022 telah diupayakan berbagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah. Tahun 2022 dari 30 Perangkat Daerah yang ada sudah 28 Perangkat Daerah yang secara aktif dan berkala menyediakan data statistik sehingga persentase ketersediaan data statistik daerah sebesar 93,33% dengan demikian realisasi program tersebut mencapai 93,33% sehingga capaian kinerja sebesar 143,58%.

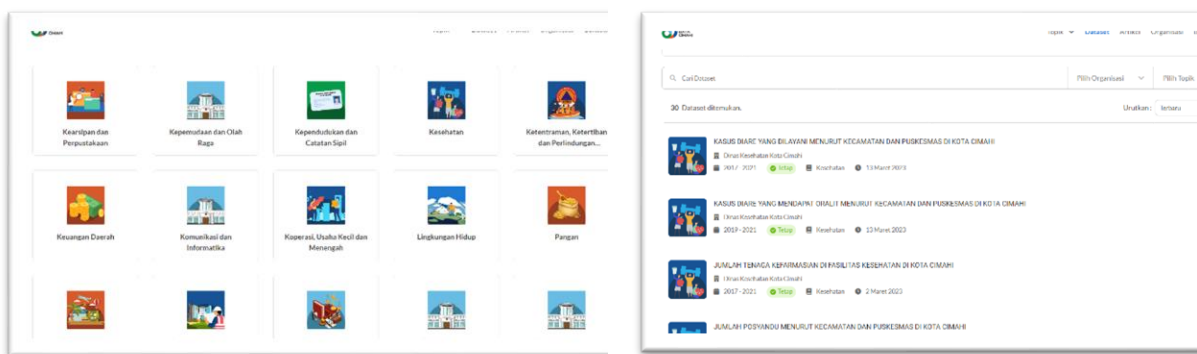
Untuk meningkatkan kinerja urusan statistik di tahun 2022 terus menerus dilakukan inovasi dan terobosan agar penyelenggaraan urusan statistik memiliki dampak luas dalam mendukung pembangunan di Kota Cimahi sebagai landasan pengambilan kebijakan-kebijakan strategis.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergabung dalam ekosistem data Jawa Barat. Ekosistem Kota Cimahi adalah Portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan dan kemudahan akses data bagi warga dan pemerintah Kota Cimahi yang dikembangkan dari hasil repikasi dari Ekosistem Jawa Barat, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Dashbard yaitu sebuah platform yang menyajikan informasi melalui visualisasi yang informatif, terintegrasi, mutakhir, dan dapat diandalkan untuk pengambilan kebijakan berbasis data yang terukur bagi pemerintah dan sarana edukasi bagi masyarakat di Pemerintah Kota Cimahi.
- b. Fungsi Open Data : Portal transparansi data dan informasi publik bagi warga Kota Cimahi Khususnya serta pihak lain yang dapat menjelajahi dan mendapatkan koleksi dataset terbuka dari Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cimahi dengan fungsi dapat dicari, temukan, unduh yang bebas birokrasi.
- c. Fungsi Satu Data : Portal kelola data bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Perangkat daerah bisa saling bagi pakai data yang akurat, terstandar, dan tanpa birokrasi untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih terukur.
- d. Fungsi Satu Peta : Portal publikasi data geospasial Pemerintah Kota Cimahi. Siapa saja bisa jelajahi data geospasial Kota Cimahi di sini. Memuat juga akses bagi perangkat daerah untuk kelola dan bagi pakai data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur.

Ketercapaian Pelaksanaan replikasi Aplikasi Ekosistem Data Kota Cimahi yang terintegrasi dengan Ekosistem Jawa Barat Tahun 2022 Adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan replikasi Aplikasi Ekosistem Kota Cimahi telah selesai, namun masih dalam trial error terhadap proses dan verifikasi data sektoral.
2. Melakukan pendaftaran perangkat daerah pada Aplikasi Ekosistem Data, Membuat klasifikasi urusan atau topik, membuat hak akses bagi pengelola, walidata dan administrator.
3. Identifikasi awal untuk migrasi data dari Open Data yang sedang berjalan yaitu data Set yang belum terstandar dari Tahun 2017 s.d 2021 pada 30 Perangkat Daerah dan 23 Urusan Pemerintahan ke bentuk data set yang sesuai prinsip satu data.
4. Melakukan migrasi data dengan melakukan cleansing data Tahun 2017 s.d 2021.
5. Membuat format data set sesuai prinsip satu data berdasarkan kebutuhan data dan ketersediaan data dari Tahun 2017 s.d 2022.
6. Secara berkelanjutan melaksanakan pendampingan pengisian data set pada format data yang sudah disusun sesuai prinsip satu data.
7. Melakukan verifikasi data set yang disampaikan oleh Perangkat Daerah sebagai fungsi Walidata.
8. Melakukan monitoring data set pada aplikasi Ekosistem Data Kota Cimahi secara berkelanjutan.



Gambar 3. 23 Aplikasi opendata Kota Cimahi hasil replikasi dari opendata Provinsi Jawa Barat

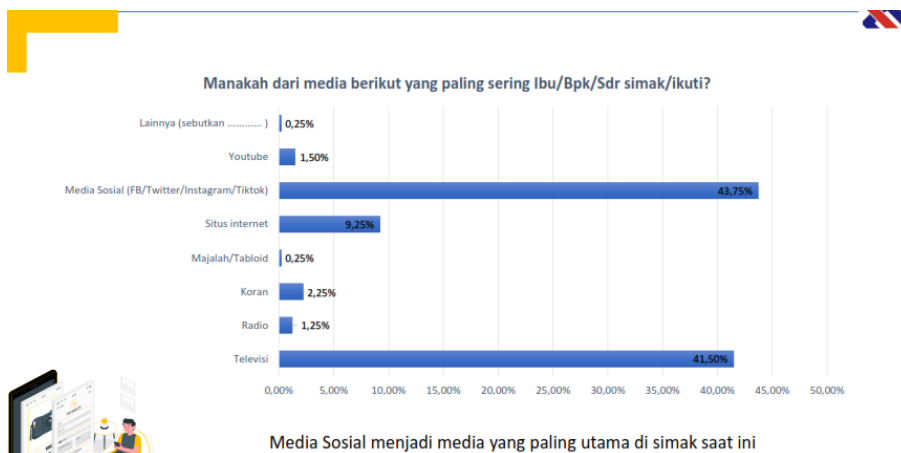
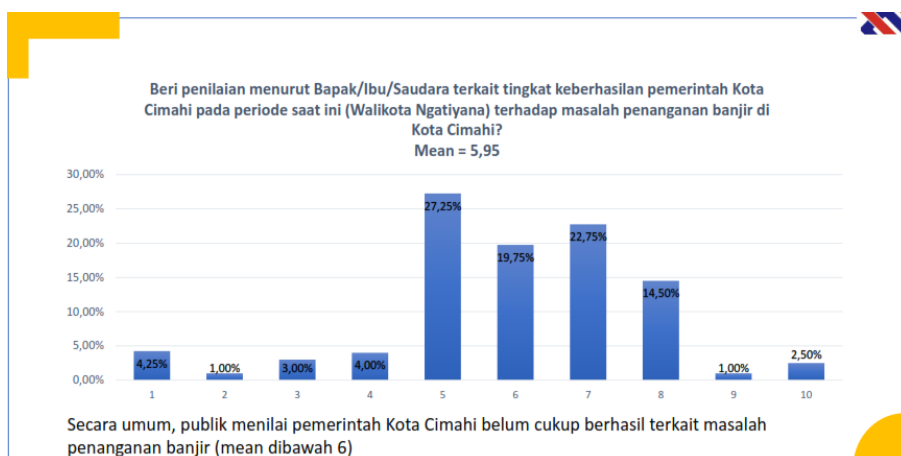
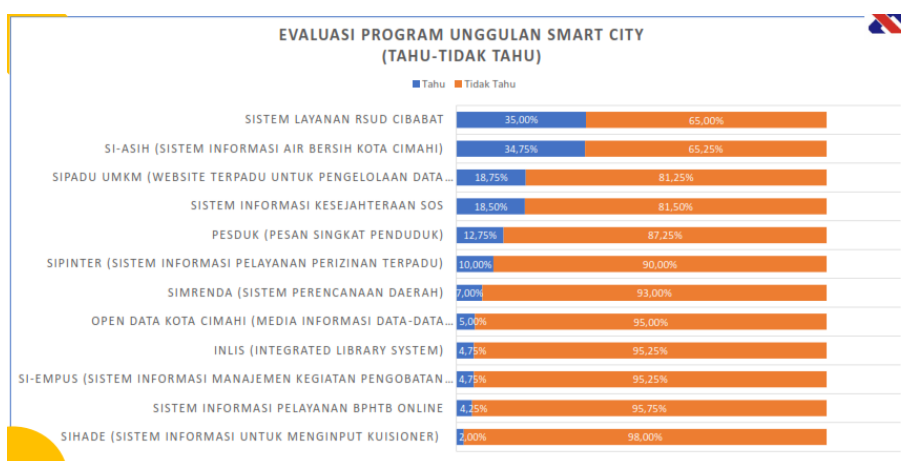
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat dua indikator kinerja dalam kegiatan ini yaitu Jumlah publikasi Data Statistik Kota Cimahi target dengan 2 Publikasi.

Realisasi publikasi yang dilakukan selama tahun 2022 terdiri dari 2 publikasi yaitu:

- 1) Buku Data Statistik Sektoral Kota Cimahi, buku ini berisi Data Statistik Sektoral dari seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Cimahi.
- 2) Survey Persepsi Warga Kota Cimahi terkait Pencapaian Pembangunan di Kota Cimahi dan jelang Pilkada Serentak Mendatang.



Gambar 3. 24 Publikasi Buku Data Statistik Sektoral Kota Cimahi



Gambar 3. 25 Publikasi Riset Evaluasi Kebijakan Publik dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Cimahi

1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Sub kegiatan ini melaksanakan pekerjaan utama melaksanakan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi statistik sektoral di Kota Cimahi. Koordinasi yang dilaksanakan meliputi koordinasi secara internal antar perangkat daerah dan koordinasi yang dilaksanakan secara eksternal baik ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pusat maupun lembaga teknis (Badan Pusat Statistik).

Terdapat 18 Sektor yang secara terus menerus setiap tahun dipenuhi ketersediaan datanya melalui survey statistik, ke 18 sektor tersebut terdiri dari:

Tabel 3. 17 Survey Statistik Sektoral yang dilaksanakan selama tahun 2022

No	Survey
1	Sektor Pendidikan
2	Sektor Pertanian
3	Sektor Kesehatan
4	Sektor Keuangan Daerah
5	Sektor Kependudukan
6	Sektor Perhubungan
7	Sektor Lingkungan Hidup
8	Sektor Hukum
9	Sektor Pemerintahan
10	Sektor Sosial dan Ketenagakerjaan
11	Sektor Pekerjaan Umum
12	Sektor Bencana
13	Sektor Pariwisata dan Kebudayaan
14	Sektor Komunikasi dan Informatika
15	Sektor Kearsipan dan Peprustakaan
16	Sektor Ekonomi
17	Sektor Pangan
18	Sektor Perdagangan

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja pada tahun 2022 adalah 4 koordinasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi, tujuan penyelenggaraan sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Pengelola statistik baik internal maupun yang berada di setiap Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 dilaksanakan 2 kali kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dengan sasaran pengelola statistik di Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut terdiri dari:

1. Pelatihan Pengolahan Data, dalam pelatihan tersebut diharapkan peserta dapat melakukan pengolahan data statistik untuk keperluan analisis dengan menggunakan aplikasi pengolah data sederhana.
2. Pelatihan teknis survey, tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah bertambahnya kemampuan dan pengetahuan tentang teknis pelaksanaan survey dengan menggunakan kaidah-kaidah dan metode survey sehingga hasil survey yang akan dilakukan nantinya memiliki kualitas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengambilan kebijakan.

Jumlah SDM pengelola data/statistik/informasi yang mengikuti pelatihan/pembinaan/pendidikan sebanyak 60 orang sesuai dengan target yang direncanakan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

3.2.4. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Keempat

Evaluasi Sasaran 4 “ Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah” Pencapaian keempat dicapai melalui penyelenggaraan urusan wajib persandian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa urusan Persandian merupakan urusan wajib yang berada satu rumpun dengan Urusan Komunikasi dan Informatika. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi bahwa Urusan Persandian diselenggarakan

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Secara struktural Urusan Persandian berada di Bidang Penyelenggaraan **e-Government** dan Persandian dan secara teknis dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Seksi Persandian dan Pengembangan Telematika. Capaian pencapaian sasaran urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 18 Pencapaian Target Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian Tahun 2022

Esselon	Sasaran	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
IV	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	35 Persen	100 Persen	100%

Pada tahun 2022 seluruh Perangkat Daerah telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah, layanan pengamanan informasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Layanan persandian yang diselenggarakan dan dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kota Cimahi terdiri dari:

1. Pendampingan dan Penerbitan Sertifikat Elektronik
2. Pembuatan Surel Resmi Pegawai dan Perangkat Daerah
3. Pentest sistem elektronik
4. Vulnerability Assesment Sistem Elektronik (ITSA)
5. Penilaian Indeks Keamanan Informasi
6. Jamming untuk Kegiatan Pimpinan
7. Security Awareness
8. Insiden Handling Cyber Security (menuju CSIRT)
9. Kontra Penginderaan
10. Integrasi sistem elektronik dengan pemanfaatan sistem elektronik.

Pada tahun anggaran 2022 Urusan Persandian dilaksanakan melalui 1 Program, 2 Kegiatan dan 3 sub kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam meningkatkan Indeks SPBE.

Alokasi anggaran untuk melaksanakan urusan persandian sebesar Rp. 368.964.000,- anggaran sebesar ini masih dikatakan jauh dari kebutuhan namun demikian ketersediaan anggaran tersebut digunakan secara optimal untuk penyelenggaraan urusan persandian Tahun 2022.

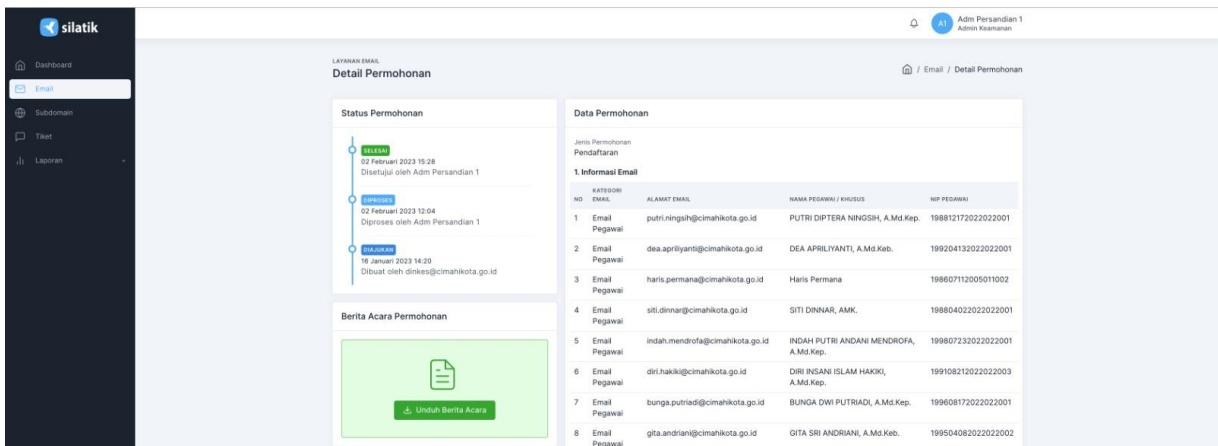
Keberhasilan capaian Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah ditunjang oleh kinerja kegiatan dan sub kegiatan berikut.

1. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah, dalam kegiatan ini indikator capaian kinerja adalah Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi. Titik PHKS yang diterapkan merupakan penggunaan email resmi dinas yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Pada tahun 2022 telah didorong agar seluruh ASN dapat memiliki dan memanfaatkan email resmi yang tingkat keamanannya telah memenuhi standar. Pemanfaatan e-mail resmi dinas diharapkan dapat mendukung implementasi Tanda Tangan Elektronik di Pemerintah Kota Cimahi. Target kinerja Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 adalah 55% titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi. Sampai saat ini sebanyak 3.195 ASN telah terdaftar menggunakan e-mail resmi dari total 4.234 ASN Pemerintah Kota Cimahi, sehingga realisasi kinerja sebesar 75,46% dengan demikian capaian kinerja sebesar 137,2% dikategorikan sangat baik.





Gambar 3. 26 Pendampingan pemanfaatan e-mail resmi dinas dan sertifikat elektronik untuk Implementasi Tanda Tangan Elektronik.



Gambar 3. 27 Gambar Pengajuan permohonan pembuatan email dinas melalui Aplikasi Silatik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

1.2. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kinerja Sub kegiatan ini diukur menggunakan indikator kinerja Jumlah penggunaan jaring komunikasi sandi dengan target kinerja 9 Perangkat Daerah, pada tahun 2022 sebanyak 30 Perangkat Daerah telah menerapkan jaring komunikasi sandi. Jaring komunikasi sandi dalam bentuk pememanfaat Sertifikat elektronik dan Tanda Tangan Elektronik. Dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2022 mencapai 333,33 %. Capaian ini sangat tinggi mengingat digitalisasi layanan menjadi fokus setiap perangkat daerah dan perlu didukung oleh penerapan TTE.

Tanda tangan merupakan tanda tulisan identitas diri seseorang sebagai keabsahan/sah tidaknya sebuah dokumen. Pada umumnya tanda tangan dibuat dengan menggunakan pena yang biasa disebut tanda tangan basah. Di era digital ini, dokumen digital ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penggunaan Tandatangan Elektronik memiliki berbagai manfaat yang menguntungkan terutama dalam implementasi Sistem Pemerintahan Elektronik Berbasis Elektronik, keuntungan tersebut antara lain

1. Efisiensi Waktu

Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dapat memangkas waktu perolehan dokumen yang ditandatangani. Biasanya jika dengan tanda tangan basah, penandatanganan dokumen kertas memerlukan pengiriman ke pihak lain memakan waktu berhari-hari. Dengan adanya TTE tersertifikasi, dalam beberapa menit bahkan tidak sampai sehari, dokumen elektronik dapat segera ditandatangani dan dikirim sekalipun dari jarak jauh seperti antar pulau maupun antar negara.

2. Kekuatan Hukum Setara dengan Tanda Tangan Basah

Perlu diketahui bahwa TTE terbagi menjadi dua, yakni Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah Tanda Tangan Elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo). Sedangkan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa PSrE Indonesia tersebut.

Saat memiliki TTE tersertifikasi, pemilik tanda tangan telah memenuhi keabsahan, kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain UU ITE, TTE tersertifikasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

3. Identitas Terjamin

Selain memiliki kekuatan hukum, keuntungan TTE tersertifikasi lainnya adalah jaminan keamanan identitas diri. Kebijakan privasi diberikan untuk memastikan data pribadi pengguna dilindungi kerahasiaannya. Keamanan informasi identitas diri lebih terjamin melalui penggunaan teknologi kriptografi asimetris (*asymmetric cryptography*) yang dibuat secara unik untuk tiap individu. *Asymmetric cryptography* merupakan teknik kriptografi yang menggunakan pasangan kunci: *public key* dan *private key* sebagai pengaman. *Public key* bersifat informasi publik yang dapat disebarluaskan secara luas untuk memvalidasi Tanda Tangan Elektronik seseorang. Sedangkan *private key* dibuat secara unik yang hanya diketahui oleh penanda tangan.

Para PSrE Indonesia telah memiliki fitur keamanan tinggi yang menjamin keautentikan, keutuhan, dan nirsangkal. Jadi, dokumen elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi akan terjamin keasliannya. Jika terjadi perubahan pada dokumen tersebut, maka TTE tersertifikasi yang tercantum tersebut tidak lagi sah. Hal ini dapat menghindarkan dari pihak tidak berwenang yang ingin memodifikasi data.

4. Hemat Biaya Pengeluaran

Jika telah memiliki TTE tersertifikasi, tidak perlu lagi memikirkan biaya anggaran berlebih karena yang dibutuhkan hanya koneksi internet dan perangkat keras seperti komputer dan telepon pintar (*smartphone*).

5. Eco-Friendly

TTE digunakan pada dokumen digital sehingga berbeda dengan tandatangan basah yang menggunakan media kertas. Dengan demikian penggunaan kertas dapat dikurangi secara signifikan apabila TTE diaplikasikan secara menyeluruh.





Gambar 3. 28 Pendampingan Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik Pegawai Perangkat Daerah Kota Cimahi guna Implementasi Jaring Komunikasi Sandi melalui Aplikasi Manajemen Kearsipan Dinamis, Srikandi.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kegiatan ini menyelenggarakan layanan pengamanan sinyal untuk kegiatan strategis. Keberhasilan kinerja kegiatan ini dapat dilihat melalui indikator berupa Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan. Pada tahun 2022 terdapat satu kali pengamanan sinyal untuk kegiatan strategis yaitu pengamanan kunjungan Presiden Indonesia di Pusdikpassus. Sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Target pada tahun 2022 sebesar 55% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja dibandingkan dengan target 182%.



Gambar 3. 29 Aktifitas Pengamanan Sinyal Kegiatan Strategis

- 2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota indikator kinerja adalah Jumlah PD yang dilakukan asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian,

Assesment tingkat kematangan keamanan informasi dan persandian yang dilakukan berupa Penetration test (Pentest)/ Vulnerability Assesment (VA). Penetration test (Pentest)/ Vulnerability Assesment (VA) adalah sebuah metode yang dilakukan evaluasi kemanan dari sebuah sistem elektronik. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan sebuah simulasi serangan. Hasil dari *pentest* ini berguna sebagai *feedback* bagi pengelola sistem untuk memperbaiki tingkat keamanan dari sistem komputer mereka, sehingga diharapkan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari sistem elektronik yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk dilakukan perbaikan system keamanan sehingga mengurangi risiko terjadinya serangan siber.

Target jumlah perangkat daerah yang dilakukan assesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian sebanyak 8 Perangkat Daerah, pada tahun 2022 realisasi kinerja sebanyak 19 Perangkat Daerah pemilik aplikasi layanan digital yang telah dilakukan assesment kemanan. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 237,5%.

Tabel 3. 19 Daftar Perangkat Daerah Pemilik Aplikasi yang telah dilakukan Penetration test/Vulnerability Assesment Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Url
1	DINAS ARSIP DAERAH	https://disarda.cimahikota.go.id/ (internet)
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	http://www.cimahikota.go.id (internet)
		https://diskominfo.cimahikota.go.id/ (internet)
3	DINAS PERHUBUNGAN	http://dishub.cimahikota.go.id (internet)
4	BAGIAN ORGANISASI SETDA	http://organisasi.cimahikota.go.id (internet)
5	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN	https://disdagkoperin.cimahikota.go.id (internet)
		http://cimahitechnopark.id (internet)
6	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAREAH	http://bappenda.cimahikota.go.id (internet)
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	http://bkpsdmd.cimahikota.go.id (internet)
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	http://dpmptsp.cimahikota.go.id (internet)
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	https://disdukcapil.cimahikota.go.id (internet)

10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	http://disbudparpora.cimahikota.go.id (internet)
11	DINAS PENDIDIKAN	http://disdik.cimahikota.go.id (internet)
12	DINAS TENAGA KERJA	http://disnaker.cimahikota.go.id (internet)
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	http://satpolppdamkar.cimahikota.go.id (internet)
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	http://bpkad.cimahikota.go.id (internet)
15	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	http://dprd-cimahikota.go.id (internet)
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT	Http://rsudcibabat.cimahikota.go.id (internet)
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	http://dlh.cimahikota.go.id (internet)
18	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	https://cimahitengah.cimahikota.go.id (internet)
19	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH	https://bpbd.cimahikota.go.id/

Tabel 3. 20 Daftar Aplikasi (Layanan SPBE) yang telah dilakukan Pentest di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

No	Nama Aplikasi	Pembuat/ Pengelola Aplikasi	URL	Klasifikasi Layanan SPBE
1	APLIKASI PESDUK (PESAN SINGKAT PENDUDUK)	Diskominfo	https://pesduk.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
2	APLIKASI PENGADUAN SP4N LAPOR	Diskominfo, Kemenpan	https://lapor.go.id (internet)	Layanan Publik
3	SISTEM INFORMASI LAYANAN TIK (SILATIK)	Diskominfo	https://silatik.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
4	PORTAL OPEN DATA	Diskominfo	https://data.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
5	APLIKASI MANAGEMENT INTEGRASI DAN PERTUKARAN DATA (MANTRA)	Diskominfo, Kemkominfo	https://mantra.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
6	PORTAL SMART CITY	Diskominfo	https://smartcity.cimahikota.go.id (internet) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cimahi.smartcity (play store) https://apps.apple.com/us/app/cimahi-smart-city/id1551570485 (app store) (internet)	Layanan Publik
7	SISTEM PENGELOLAAN EMAIL	Diskominfo	https://webmail.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
8	SISTEM INFORMASI MONITORING JARINGAN	Diskominfo	https://netmon.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan

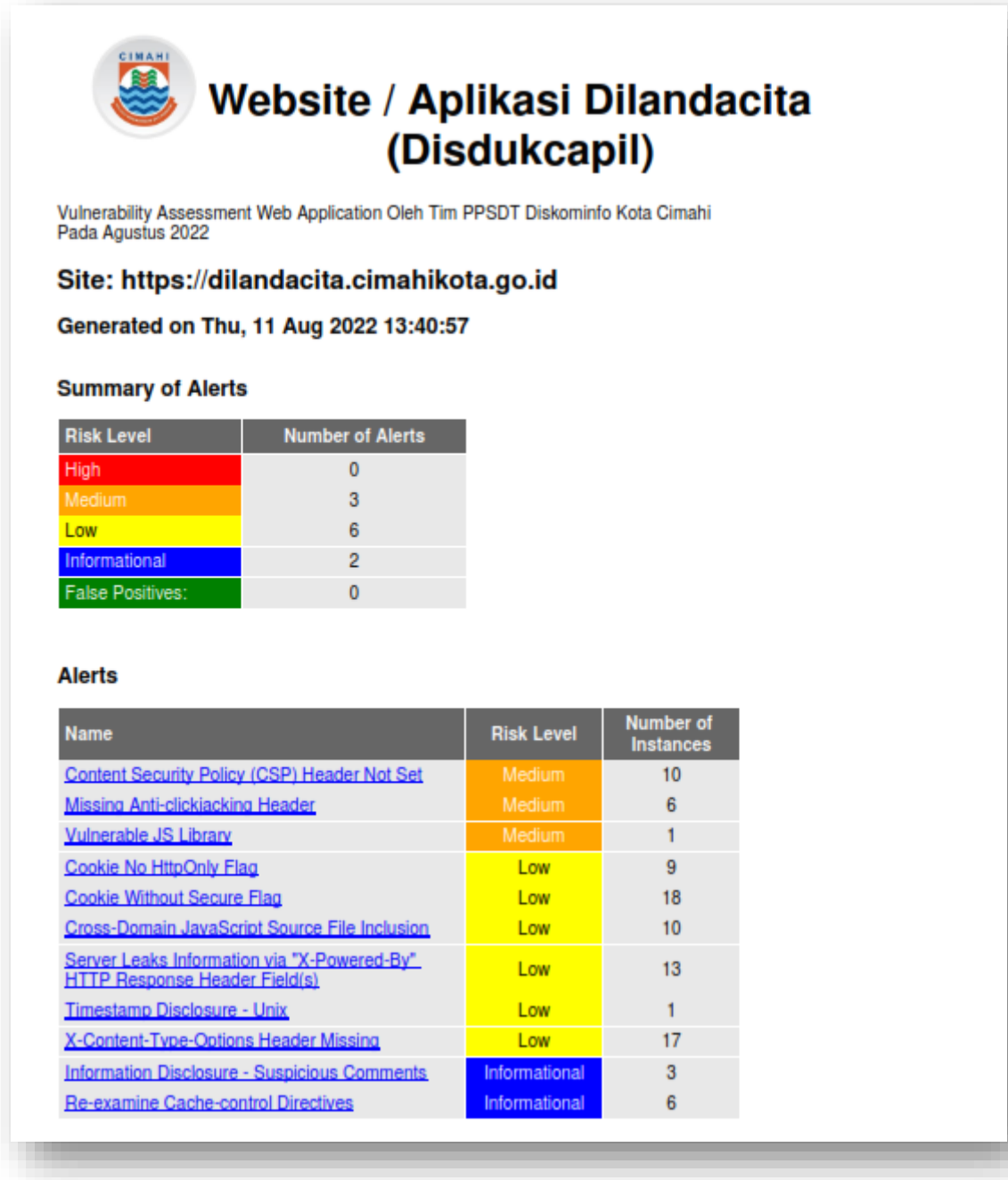
No	Nama Aplikasi	Pembuat/ Pengelola Aplikasi	URL	Klasifikasi Layanan SPBE
9	SISTEM INFORMASI MONITORING BANDWIDTH	Diskominfo	https://prtg.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
10	WEBSITE PPID KOTA CIMAHI	Diskominfo	https://ppid.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
11	WEBSITE PUSAT INFORMASI COVID-19 KOTA CIMAHI	Diskominfo	https://covid19.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
12	SISTEM MANAJEMEN DAN BERBAGI FILE BERBASIS CLOUD (CIMAHI DRIVE)	Diskominfo	https://drive.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
13	SISTEM INFORMASI JADWAL KEGIATAN (SIJAKI)	Diskominfo	https://sijaki.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
14	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INOVASI DAERAH (SID)	Diskominfo	https://sid.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
15	APLIKASI PERPUSTAKAAN (INLIS)	Disarsipda, ANRI	https://library.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
16	E-LIBRARY	Disarda, Gramedia	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsfoundry.eperpuswl.id.perpusda (play store) https://apps.apple.com/id/app/elib-kota-cimahi/id1418448526 (app store) (internet)	Layanan Publik
17	SISTEM INFORMASI ARSIP DINAMIS	Disarda	https://arsipdinamis.cimahikota.go.id (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
18	SISTEM INFORMASI ARSIP DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)	Disarda, ANRI	https://srikandi.arsip.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
19	SISTEM INFORMASI ARSIP STATIS	Disarda	https://arsipstatis.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
20	SISTEM INFORMASI GAJI	BPKAD, PT. TASPEN	https://simgajiweb.taspen.co.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
21	SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)	Bappeda, BPKAD, Kemendagri	https://cimahi.sipd.kemendagri.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
22	APLIKASI UPTUUPDATE	BPKAD	https://uptupdate.cimahikota.go.id/ (intranet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
23	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASN KOTA CIMAHI (SIMAKCI)	BKPSDMD	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/simakci/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
24	SISTEM INFORMASI SKP ONLINE	BKPSDMD	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/skp-cimahi/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
25	SISTEM INFORMASI KINERJA ASN KOTA CIMAHI (SIKACI)	BKPSDMD	https://ekinerja.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
26	SISTEM CIMAHI ELEKTRONIK ABSENSI PNS (SICEKAS)	BKPSDMD	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/sicekas/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan

No	Nama Aplikasi	Pembuat/ Pengelola Aplikasi	URL	Klasifikasi Layanan SPBE
27	SISTEM INFORMASI HUMAN CAPITAL CARE (E-HCC)	BKPSDMD	https://bkpsdmd.cimahi.kota.go.id/hcc/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
28	SISTEM INFORMASI KENAIKAN GAJI BERKALA DAN INPASING	BKPSDMD	https://bkpsdmd.cimahi.kota.go.id/kgb-cimahi/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
29	SISTEM KEHADIRAN BERLOKASI ASN CIMAHI (SIKONCI)	BKPSDMD	https://sikonci.cimahikota.go.id (internet) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SIKONCI&hl=in&gl=US (play store SIKONCI versi standar) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SIKONCILite (play store SIKONCI versi Lite)	Layanan Administrasi Pemerintahan
30	SISTEM INFORMASI DIKLAT	BKPSDMD	https://bkpsdmd.cimahi.kota.go.id/diklat/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
31	SISTEM ONLINE CUTI KOTA CIMAHI (SIONCOM)	BKPSDMD	https://bkpsdmd.cimahi.kota.go.id/sioncom/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
32	SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIR (SIBANGJAKA)	BKPSDMD	https://bkpsdmd.cimahi.kota.go.id/sibangjaka/ (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
33	SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)	BKPSDMD, BKN	https://sapk.bkn.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
34	APLIKASI DIGITALISASI LAYANAN ADMINDUK CIMAHI KOTA (DILANDACITA)	DISDUKCAPIL	https://dilandacita.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
35	SISTEM INFORMASI PENDAPATAN (E-PAD)	BAPPENDA	https://epad.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
36	SISTEM INFORMASI BPHTB ONLINE	BAPPENDA	https://bphtb.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
37	SISTEM MONITORING PBB	BAPPENDA	https://pbbmon.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
38	SISTEM INFORMASI PEMERIKSAAN PBB (SIPRABU)	BAPPENDA	https://siprabu.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
39	SISTEM INFORMASI DOKUMEN LAPORAN ONLINE (SIIDOLA)	Dinas Kesehatan	https://siidola.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
40	PORTAL LAYANAN KESEHATAN CIMAHI (SMART HEALTH)	Dinas Kesehatan	https://pik.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
41	APLIKASI ANDALAN RSUD CIBABAT (ANTRIAN MUDAH DAN LANCAR)	RSUD CIBABAT	https://rsudcibabat.cimahikota.go.id/antri/daftar	Layanan Publik
42	SISTEM INFORMASI PENDATAAN KELUARGA	DP3AP2KB, BKKBN	https://portalpk21.bkkbn.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan

No	Nama Aplikasi	Pembuat/ Pengelola Aplikasi	URL	Klasifikasi Layanan SPBE
43	PENERIMAAN SISWA BARU ONLINE (PPDB ONLINE)	Dinas Pendidikan, Disdik Provinsi Jabar	https://ppdb.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
44	DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Dinas Pendidikan, Kemdikbud	https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
45	DATA POKOK PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS	Dinas Pendidikan, Kemdikbud	https://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
46	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEHADIRAN	Dinas Pendidikan	https://simak.cimahikota.go.id (internet) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cimahi.simak (play store) (internet)	Layanan Publik
47	SISTEM INFORMASI PERIZINAN ONLINE (SIPINTER)	DPMPTSP	https://dpmpstsp.cimahikota.go.id/login/ (Internet)	Layanan Publik
48	SISTEM INFORMASI AIR BERSIH (SIASIH)	DPKP	https://siasih.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
49	SIM Pengelolaan Bank Sampah	DPKP	https://simbah.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
50	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Taman (SIMANTAN)	DPKP	https://simantan.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
51	SIM Kebudayaan dan Pariwisata	DISBUDPORA	https://pariwisata.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
52	SIM KOMODITAS PASAR	DISDAGKOPERIN (UPT Pasar)	https://uptpasar.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
53	LAPAKU	DISDAGKOPERIN	https://lapaku.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
54	APLIKASI PELAYANAN HAKI	DISDAGKOPERIN	https://hki.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
55	SISTEM INFORMASI TATA RUANG	DPUPR	https://sitarung.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
56	SISTEM INFORMASI TENAGA KERJA (CIMASISTAKER)	DISNAKER	https://chimasistaker.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
57	SISTEM INFORMASI LINK AND MATCH	DISNAKER	https://silima.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
58	SISTEM INFORMASI DATA KETENAGAKERJAAN DAN PELATIHAN TERINTEGRASI	DISNAKER	https://sidakeptri.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
59	SISTEM INFORMASI LEGISLATIF EKSEKUTIF	Sekretariat DPRD	https://silegeks.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
60	SiRUP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, LKPP	https://sirup.lkpp.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
61	E-MONEV	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, LKPP	https://monev.lkpp.go.id (internet)	Layanan Administrasi Pemerintahan
62	SISTEM INFORMASI DATA TERPADU UMKM (SIPADUUMKM)	Kecamatan Cimahi Tengah	https://sipaduumkm.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik

No	Nama Aplikasi	Pembuat/ Pengelola Aplikasi	URL	Klasifikasi Layanan SPBE
63	SISTEM INFORMASI DATA TERPADU UMKM (SIPADUUMKM)	Kecamatan Cimahi Tengah	https://sipaduumkm.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
64	SISTEM TAMU WAJIB LAPOR (SITAWA)	Kelurahan Padasuka	https://sitawa.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
65	WEBSITE PEMDA	Diskominfoarpus	https://cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
66	WEBSITE DISHUB	DISHUB	https://dishub.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
67	WEBSITE BAGIAN ORGANISASI SETDA	Bagian Organisasi	https://organisasi.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
68	WEBSITE DIDAGKOPERIN	DISDAGKOPERIN	https://disdagkoperin.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
69	WEBSITE DINAS KESEHATAN	Dinkes	https://dinkes.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
70	WEBSITE DISKOMINFO	Diskominfo	https://diskominfo.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
71	WEBSITE BAPPENDA	Bappenda	https://bappenda.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
72	WEBSITE BKPSDMD	BKPSDMD	https://bkpsdmd.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
73	WEBSITE DPMPSTSP	DPMPSTSP	https://dpmpstsp.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
74	WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	DISDUKCAPIL	https://disdukcapil.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
75	WEBSITE DISBUDPARPORA	DISBUDPARPORA	https://disbudparpora.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
76	WEBSITE DINAS PENDIDIKAN	DISDIK	https://disdik.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
77	WEBSITE CIMAHI TECHNOPARK	DISDAGKOPERIN /CIMAHI TECHNOPARK	https://cimahitechnopark.id (internet)	Layanan Publik
78	WEBSITE DISNAKER	DISNAKER	https://disnaker.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
79	WEBSITE SATPOLPP DAN DAMKAR	SATPOL PP & DAMKAR	https://satpolppdamkar.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
80	WEBSITE BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI	BPKAD	https://bpkad.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
81	WEBSITE DINAS KEARSIPAN DAERAH KOTA CIMAHI	DISARDA	https://disarda.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
82	WEBSITE RSUD CIBABAT	RSUD CIBABAT	https://rsudcibabat.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
83	WEBSITE DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	https://dlh.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik

No	Nama Aplikasi	Pembuat/ Pengelola Aplikasi	URL	Klasifikasi Layanan SPBE
84	WEBSITE BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI	BPBD	https://bpbd.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik
85	WEBSITE KECAMATAN CIMAHI TENGAH	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	https://cimahitengah.cimahikota.go.id (internet)	Layanan Publik
86	WEBSITE KELURAHAN CIPAGERAN	KELURAHAN CIPAGERAN	https://cipageran.cimahikota.go.id/ (internet)	Layanan Publik



Gambar 3. 30 Hasil Penetration test/Vulnerability Assesment terhadap aplikasi dilandacita.cimahikota.go.id.

2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, indikator kegiatan adalah jumlah layanan

kemanan informasi yang dilakukan dengan target pada tahun 2022 adalah 10 layanan dan direalisasikan 10 layana sebagai berikut:

1. Pendampingan dan Penerbitan Sertifikat Elektronik
2. Pembuatan Surel Resmi Pegawai dan Perangkat Daerah
3. Pentest sistem elektronik
4. Vurneralbility Assesment Sistem Elektronik (ITSA)
5. Penilaian Indeks Keamanan Informasi
6. Jamming untuk Kegiatan Pimpinan.
7. Security Awareness.
8. Insiden Handling Cyber Security (menuju CSIRT).
9. Kontra Penginderaan.
10. Integrasi sistem elektronik dengan pemanfaatan sistem elektronik.

Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100%, dengan kata lain target penyelenggaraan 10 layanan terealisasi pada tahun 2022.

Evaluasi Indeks KAMI

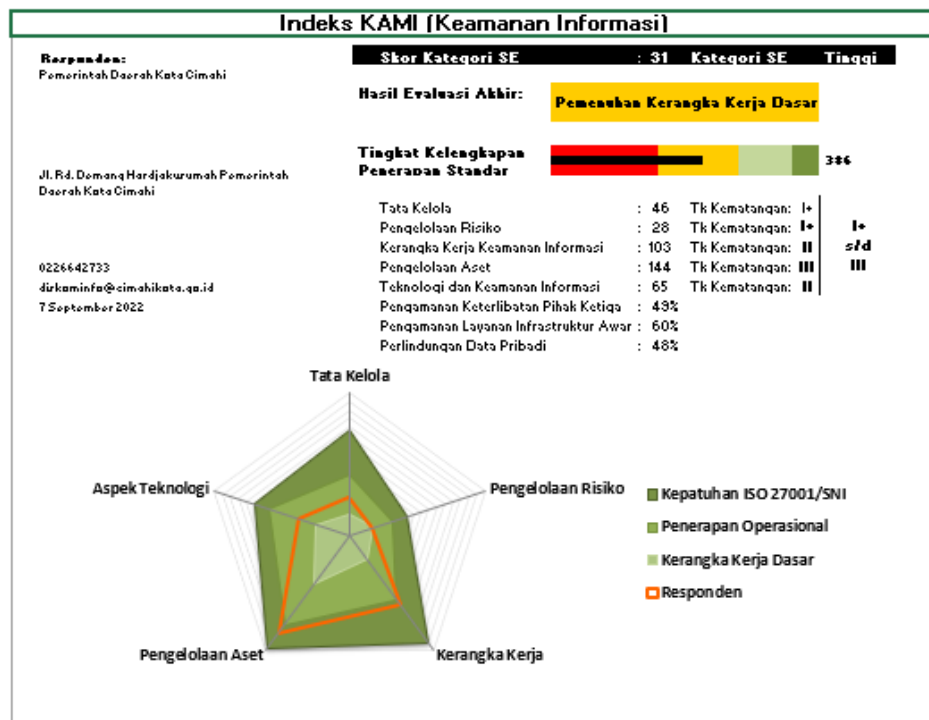
Hasil penilaian Indeks KAMI pada tahun 2022 memperoleh skor 386, hasil ini masuk ke dalam kategori Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar. Status ini masih diperlukan upaya perbaikan untuk dapat menuju kategori status yang lebih baik. Peningkatan Nilai Indeks KAMI ini tentunya diperlukan dukungan dari berbagai aspek terutama anggaran dan SDM.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya proses yang ada. Data yang digunakan

dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan snapshot indeks kesiapan - dari aspek kelengkapan maupun kematangan - kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembandingan dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.

Alat evaluasi ini kemudian bisa digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait (stakeholders).



Gambar 3. 31 Hasil Penilaian Indeks KAMI Tahun 2022

Implementasi *Security Awareness* di Kota Cimahi

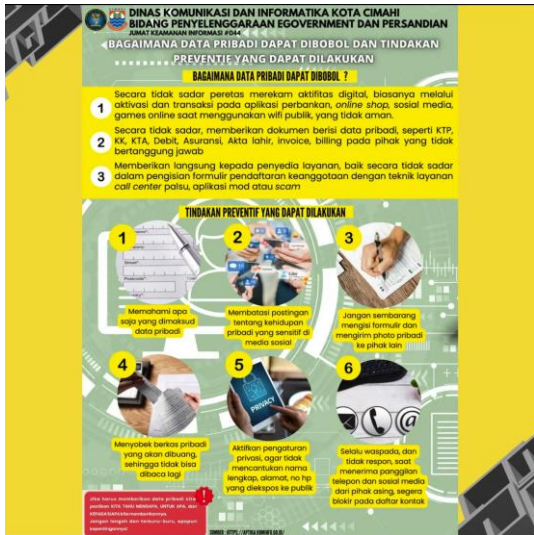
Security Awareness atau kesadaran keamanan adalah pengetahuan, pemahaman dan sikap anggota organisasi terkait perlindungan aset fisik dan non fisik dan terutama informasi pribadi dan organisasi itu sendiri. Mengapa *security awareness* itu penting bagi sebuah organisasi:

1. Memenuhi persyaratan ISO 27001 (2013) sesuai website Itg.id, ISO 27001 adalah sebuah dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau *Information Security Management System* (ISMS) yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam mengimplementasikan konsep keamanan informasi.

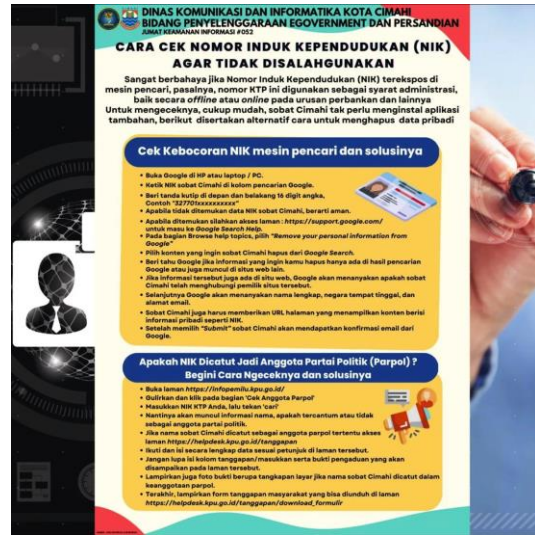
2. Mengatasi ancaman keamanan informasi yang cepat dan selalu berubah, menjaga nilai organisasi (selaras dengan tujuan manajemen risiko).
3. Mencegah serangan *social engineering*. Dalam hal ini, pencegahan serangan *social engineering* bertujuan untuk memastikan pegawai menyadari pentingnya :
 - a) Perlindungan akan informasi sensitif;
 - b) Apa yang harus dilakukan untuk menangani informasi dengan aman;
 - c) Risiko kesalahan penanganan informasi; dan
 - d) Konsekuensi organisasi dan pribadi dari kesalahan penanganan informasi sensitif.
4. Merupakan program berkelanjutan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan program berkelanjutan adalah program yang tidak hanya disampaikan sebagai kegiatan tahunan, melainkan digunakan sebagai aktivitas untuk mempertahankan tingkat *security awareness* yang tinggi setiap hari.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menerapkan kegiatan *Security Awareness* dengan jargon #JUMATKAMI (Jumat Kabar Keamanan Informasi) dimana setiap Hari Jum'at di setiap minggunya, Tim Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menyebarluaskan informasi dalam bentuk flyer terkait *Cyber Security* di group media sosial dengan tujuan agar pembaca memahami hakekat keamanan informasi itu adalah sesuatu hal yang penting dan budaya mengabaikan hal yang sangat penting dalam hal keamanan informasi ini berubah seiring waktu.

Kegiatan *Security Awareness* ini telah dilaksanakan dari awal Tahun 2022, secara konsisten, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi telah menyebarkan sebanyak 62 edisi. Agar kegiatan ini dapat diukur keberhasilannya, pada Triwulan I, Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi telah menyebarkan surat yang berisi pengisian kuesioner untuk mengetahui kondisi awal tingkat pengetahuan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi terkait keamanan informasi dalam bersosial media.



Edisi 44
Disebarkan pada Tanggal
4 November 2022



Edisi 52
Disebarkan pada Tanggal
30 Desember 2022



Edisi 58
Disebarkan pada Tanggal
10 Februari 2023



Edisi 59
Disebarkan pada Tanggal
17 Februari 2023

Gambar 3. 32 contoh *flyer Security Awareness* yang telah disebar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

3.2.5. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kelima

Evaluasi Sasaran 5 “ Meningkatkan Kinerja Organisasi”

Urusan pendukung pemerintahan didalamnya terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menunjang dan mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi agar berjalan efektif dan efisien. Urusan pendukung pemerintahan secara struktural diemban oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretariat pada suatu perangkat daerah merupakan struktur dalam organisasi yang menjalankan fungsi manajemen sumber daya pada perangkat daerah melalui layanan internal atau supporting system, meliputi aspek perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum. Kinerja layanan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Pencapaian Target Kinerja Sasaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Saekretariat Tahun 2022

Esselon	Sasaran	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
V	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai LAKIP	75,65	75,83	100,24%

Realisasi capaian kinerja sasaran program Penunjang Urusan Pemerintah didapat dari hasil evaluasi Lakip, capaian tahun 2022 menggunakan ralisasi tahun 2021 dikarenakan hasil evaluasi Lakip pada saat penyusunan laporan ini belum dikeluarkan. Secara umum pelayanan internal yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dapat mendukung kinerja organisasi. Rata-rata capaian kinerja masing-masing sub kegiatan mencapai 100% dengan kata lain target tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 telah dilakukan evaluasi implelementasi Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Evaluasi Reformasi reformasi yang dilaksanakan meliputi 8 area perubahan yang telah diimplemntasikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Predikat yang diperoleh dari hasil evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika masuk ke dalam 10 besar Perangkat Daerah yang mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan Nilai 78,71 dengan preikat BB.



Gambar 3. 33 Gambar Capaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

3.3. **Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.**

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi yang diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, untuk masing-masing urusan kewenangan dijabarkan, dideskripsikan dan dinarasikan berdasarkan data-data kinerja proses maupun output baik secara numerik maupun visual.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	7	9	10
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen cakupan Pengembangan E-Government Daerah	80	91	113,75%
I.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	86	100	116,63%
I.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK	90	100	111,11%
I.2.	Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen cakupan layanan TIK	50	100	200,00%

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Level Pusat Data	3	5	166,67%
1.2.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah aplikasi yang dikelola	35	123	351,43%
1.2.3	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	aktivitas pengembangan kota cerdas	3	4	133,33%
1.2.4	Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100,00%
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persen Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	60	60	100,00%
II.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen analisis berita yang berkonten positif	80	100	125,00%
II.1.1	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	persen permintaan layanan informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	50	99,20	198,4%
II.1.2	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Publikasi pemerintahan	3.530	3.999	113,29%
II.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Berita pada website dan media lainnya	800	1.860	232,50%
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen ketersediaan data statistik daerah	65	93,33	143,58%
III.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	publikasi Data Statistik Kota Cimahi	2	2	100,00%
III.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	kali koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja	4	4	100,00%
III.1.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	SDM pengelola data/statistik/informasi yang mengikuti pelatihan/pembinaan/pendidikan	60	60	100,00%
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	35	100	285,71%
IV.1	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	55	75,46	137,20%

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
IV.1.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah penggunaan jaring komunikasi sandi	9	30	333,33%
IV.2	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	55	100	182,00%
IV.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang dilakukan asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian	8	19	237,50%
IV.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan kemanan informasi yang dilakukan	10	10	100,00%
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Nilai LAKIP	75,65	75,83	100,24%
V.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100	100	100,00%
V.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumenPerencanaan PD	2	2	100,00%
V.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD	2	2	100,00%
V.2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	75	75	100,00%
V.2.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	unit barang milik daerah yang dilakukan pengamanan	5	5	100,00%
V.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	12	12	100,00%
V.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BulanPenyediaan Logistik Kantor	12	12	100,00%
V.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan penyediaan cetakan dan penggandaan	12	12	100,00%
V.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Set peralatan dan perlengkapan kantor	10	10	100,00%
V.3.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aktivitas koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	120	120	100,00%
V.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	100,00%
V.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00%
V.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100,00%

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
V.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan penyediaan pelayanan umum kantor	12	12	100,00%
V.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan pemeliharaan barang milik daerah	12	12	100,00%
V.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan	5	5	100,00%
V.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan pemeliharaan gedung/kantor dan bangunan lainnya	12	12	100,00%
V.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	19	19	100,00%
V.6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PegawaiPegawai Yang terfasilitasi pembinaan	48	43	89,58%
V.6.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai yang mengikuti sosialisasi	48	43	89,58%
V.7	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen administrasi keuangan terlaksana	100	100	100,00%
V.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	29	29	100,00%
V.7.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12	12	100,00%

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum dapat tercapai sesuai target bahkan beberapa sasaran melebihi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini merupakan hasil kerjakeras seluruh elemen Diskominfo yang memiliki komitmen untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan dan menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

3.3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 3. 23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (*impact*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, Tahun 2021 dan 2022

No	SASARAN STRATEGIS (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2020			KINERJA 2021		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	3,18	2,75	86	3,19	3,09	97
2	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	%	80	89	100	85	93,33	110
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	Nilai SAKIP Dinas	Predikat	BB	BB	100%	BB	BB	100%

Perbandingan realisasi capaian kinerja IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan pada sasaran Meningkatkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Meningkatkan tata kelola statistik sektoral daerah. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.

Capaian Indeks SPBE pada tahun 2021 sebesar 2,75 pada tahun 2022 meningkat cukup signifikan menjadi 3,09. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan indeks SPBE dengan menyusun Arsitektur SPBE, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Arsitektur SPBE Nasional sebagai pedoman dalam menyusun Arsitektur SPBE Daerah. Keberhasilan penerapan SPBE Daerah dalam penyelenggaraan alur hidup pemerintahan perlu didukung oleh arsitektur yang terperinci sehingga dapat menjadi acuan pengembangan SPBE dalam institusi. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara Proses bisnis, Data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung oleh Manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan Tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah. Strategi ini telah berhasil meningkatkan Indeks SPBE Tahun 2022 menjadi 3,09.

Peningkatan capaian kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola statistik sektoral di tahun 2022 meningkat berdasarkan indikator kinerja Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral dari 89% pada tahun 2021 menjadi 93,33% pada tahun 2022.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Dalam proses untuk mencapai target kinerja organisasi selama tahun 2022 terdapat beberapa hal penting yang menjadi bahan pembelajaran untuk pelaksanaan kinerja selanjutnya. Analisis terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, sebagai berikut:

a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Tabel 3. 24 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Komunikasi dan Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Layanan hubungan media	Gencarnya pemberitaan tentang pembangunan Kota Cimahi (B)	Kerjasama yang baik dengan media massa	Dilakukannya perencanaan publikasi
		Prosentase masyarakat yang mengetahui program pemerintah masih perlu ditingkatkan (G)	sarana penyebarluasan informasi belum tepat dengan kondisi masyarakat	Dilakukannya penelitian terhadap penyebarluasan informasi yang efektif, perencanaan publikasi dan strategi komunikasi
		Publikasi kegiatan kepala daerah melalui media sosial sangat intensif (B)	Fokus pendokumentasian kegiatan kepala daerah sangat tinggi	Kerjasama dengan perangkat daerah untuk dokumentasi kegiatan yang menghadirkan kepala daerah
		Tidak sesuai nya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan dengan yang seharusnya	Tidak adanya konsep / Belum memiliki strategi komunikasi	Dilakukannya perencanaan publikasi/penyusunan strategi komunikasi
2	Pelayanan Informasi Publik	Adanya fasilitas /sarana pelayanan informasi yang baik (B)	Dilaksanakannya perencanaan untuk sarpras pelayanan informasi	Peningkatan layanan informasi
		Respon terhadap pengaduan masyarakat masih perlu ditingkatkan (G)	Belum adanya sistem yang efektif untuk memonitor respon terhadap pengaduan masyarakat	Peningkatan kinerja layanan pengaduan masyarakat
		analisis berita media dilakukan untuk setiap berita tentang	Adanyan langganan Koran dan majalah secara rutin	Hasil analisis berita dievaluasi secara lebih mendetail secara

		pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Cimahi (B)		substansi sebagai bahan masukan bagi pengamalan kebijakan pimpinan
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Hasil analisis berita belum digunakan sebagai <i>feedback</i> bagi kegiatan publikasi (G)	Tidak terpetakannya alur kerja publikasi dan layanan informasi	Penyusunan proses bisnis bidang informasi dan komunikasi publik

Tabel 3. 25

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Statistik Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi belum berdampak secara efektif pada pengembangan data statistik (G)	Koordinasi dilakukan satu arah.	Metode dan materi koordinasi disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang dihadapi
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Pembinaan kepada pengelola statistik belum berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik (G)	Belum adanya nomenklatur jabatan khusus pengelola data pada Perangkat Daerah.	Melakukan analisis jabatan untuk menyediakan jabatan fungsional Analis Data Ilmiah sebagai pengelola data statistik
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sebagian besar perangkat daerah memberikan dukungan terhadap penyediaan data statistik sektoral. (B)	Adanya sistem pendataan dan database hasil pendataan yang baik berbasis aplikasi	Mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi
		Validasi untuk memastikan kualitas data statistik belum dapat dilakukan secara optimal mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas (G)	Tidak dilakukannya kegiatan pendataan untuk data-data tertentu, karena bukan merupakan hasil aktivitas rutin/ harian perangkat daerah, karena tidak adanya anggaran untuk pendataan dan pemutakhiran data	Menyusun prioritas data dan prioritas pendataan.
		Dilakukan peningkatan kualitas data yang lebih baik secara terus menerus (B)	Melakukan replikasi aplikasi open data milik Provinsi Jawa Barat untuk dimanfaatkan bagi pengelolaan data statistik Kota Cimahi.	Melakukan migrasi data ke dalam portal ekosistem data Kota Cimahi
		Peningkatan kapasitas SDM Statistik baik internal maupun di perangkat daerah dilaksanakan secara terus menerus (B)		

b.

Bidang Penyelenggaraan e-Government

Tabel 3. 26

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Komunikasi dan Informatika, Bidang Penyelenggaraan e-Government Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Seluruh perangkat daerah telah terlayani jaringan internet (B)	Meningkatnya peyelenggaraan pemerintah secara online	Pelaksanaan SOP Layanan Jaringan
		Beberapa unit layanan pemerintah belum disambungkan jaringan FO (G)	Kemampuan anggaran belum mendukung	Menggunakan saluran VPN untuk komunikasi berbasis TIK
		Kebutuhan internet seluruh perangkat daerah dapat dipenuhi (B)	Kapasitas bandwith tersedia dan kualitas sarana peralatan sangat menunjang	Pemeliharaan jaringan infrastruktur harus terkontrol
		Belum adanya peraturan perundangan daerah tentang pengelolaa SPBE (G)		Penyusunan Peraturan Tata Kelola SPBE
2	Kompetensi SDM bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Seluruh personil SDM Infrastruktur mengikuti pelatihan secara rutin setiap tahun (B)	Tersedianya alokasi anggaran dan lembaga pelatihan yang kompeten	Mengikuti perkembangan kemajuan infrastruktur TIK
		Jumlah aparatur yang mempunyai kemampuan dalam infrastruktur jaringan sangat terbatas(G)	Penyediaan THL	Menyampaikam usulan poenerimaan ASN yang mempunyai kemampuan bidang infrastruktur jaringan TIK
5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Tingginya atensi masyarakat terhadap TIK (B)	Maraknya perkembangan TIK	Memanfaatkan potensi ahli-ahli muda IT
		Keikutsertaan cimahi dalam smart city (G)		Mendorong terciptanya berbagai inovasi dalam mendukung penyelenggaraan smart city
6	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penggunaan aplikasi sistem informasi meningkatkan kinerja organisasi (B)	Jumlah aplikasi yang terintegrasi semakin banyak	Kebijakan baru terkait aplikasi umum dan khusus harus disikapi dengan cerdas
		Kurangnya personil yang memiliki kompetensi untuk mendukung pengembangan aplikasi	Meyediakan tenaga ahli yang memiliki kemampuan IT yang dibutuhkan	Menyampaikam usulan poenerimaan ASN yang mempunyai kemampuan bidang infrastruktur jaringan TIK

Tabel 3. 27 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Persandian Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	Sosialisasi dan Bimbingan teknis tentang keamanan informasi kepada perangkat daerah	Komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan keamanan informasi	Dilakukan sosialisasi dalam skala lebih luas melalui berbagai media

	Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dilakukan secara intensif (B)		
		Masih rendahnya (security awareness) pemahaman dan perilaku pengguna TIK terhadap keamanan informasi (G)	Kekurang pedulian terhadap masalah keamanan informasi	Dilakukan sosialisasi dalam skala lebih luas terhadap seluruh personil dan masyarakat
		Belum terpetakannya Sumber Daya komunikasi dan informasi (G)	Belum dilakukan penghitungan secara detail tentang sumberdaya komunikasi dan informasi	Kerjasama dengan perguruan tinggi / lembaga penelitian
2	Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh perangkat daerah dan sebagian besar ASN telah memiliki akun email berdomain cimahikota.go.id(B)	Layanan dan pendampingan pembuatan dan penggunaan email resmi pemerintah Kota Cimahi	Menggalakkan penggunaan email resmi berdomain cimahikota.go.id
		Prosentase perangkat daerah yang menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi masih sangat rendah (G)	Penggunaan email cimahikota.go.id belum optimal	Membangun kemudahan penggunaan email cimahikota.go.id
3	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peralatan sandi yang dimiliki Kota Cimahi cukup untuk kegiaiatan persandian (B)		Optimalisasi penggunaan peralatan sandi untuk keamanan informasi
		Belum adanya kamar sandi (G)	Ruangan tidak memadai	Koordinasi dengan Pimpinan

c. Sekretariat

Tabel 3. 28 Analisa Keberhasilan Dan Kegagalan Kegiatan Kesekretariatan Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Substansi LAKIP merupakan narasi pelaksanaan tupoksi (B)	Ketersediaan data kinerja	Perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan prediksi anggaran kas (G)	Perencanaan masih belum dilakukan secara cermat	Antisipasi tidak tercapainya target kinerja karena kurangtepatan perkiraan penyerapan anggaran
		Pertanggung jawaban sesuai aturan (B)	Verifikasi yang cermat	Peningkatan pengetahuan tentang administrasi keuangan
3	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terdapat sarana dan prasaran yang saat ini memiliki usia pakai cukup tinggi sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang besar(G)	Adannya kebutuhan anggaran yg lebih prioritas	Mengajukan penghapusan barang milik daerah bagi peralatan yang sudah melebihi umur ekonomis

4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Fasilitasi makanan minuman untuk rapat terpenuhi (B)	ketersediaan anggaran yang memadai	Manajemen alokasi sumberdaya makanan minuman
---	----------------------------------	--	------------------------------------	--

3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

$$= 100\% - \left[\frac{11.783.745.018}{13.628.765.080} \times 100\% \right]$$

$$= 13,54\%$$

Pada tahun 2022 realisasi anggaran/biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan seluruh program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Rp. 11.783.745.018, sedangkan target biaya sebesar Rp. 13.628.765.080. Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar 13,54%. Persentase efisiensi ini tersebut cukup baik, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

Telah terjadi efisiensi anggaran yang cukup besar dengan mendukung dan fasilitasi penyelenggaraan rapat serta pertemuan secara online melalui aplikasi *video conference*. Fasilitasi penyelenggaraan rapat dan pertemuan secara online tidak hanya dilakukan internal Dinas Komunikasi dan Informatika namun juga fasilitasi dilakukan untuk pimpinan dan perangkat daerah lainnya.

3.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah:

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi basis bagi peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan

pemerintahan. Capaian kinerja Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika didukung oleh infrastruktur jaringan dan aplikasi. Infrastruktur jaringan memastikan bahwa seluruh perangkat daerah terhubung dengan jaringan internet meupun jaringan wide area network. Sampai saat ini seluruh perangkat daerah di Kota Cimahi sudah terhubung dengan jaringan dengan kualitas intenet yang cukup memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara online. Sedangkan dari sisi aplikasi saat ini secara terus menerus dilakukan integrasi aplikasi dari berbagai aplikasi yang digunakan sebagai layanan publik dan layanan administrasi.

Capaian indikator program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada tahun 2022 yaitu Cakupan Pengembangan E-Government Daerah dari target 80% terealisasi sebesar 91% melebihi target atau capaian kinerja mencapai 113,75%.

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.453.709.120 dan terealisasi sebesar Rp. 2.634.322.081 realisasi anggaran 76,28% dan efisiensi sebesar 23,72%. Terdapat belanja videotron tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 karena tidak ada penyedia yang dapat memenuhi persyaratan pemenuhan TKDN sesuai dengan peraturan yang disyaratkan

b. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program Infromasi dan Komunikasi Publik merupakan program untuk mendukung urusan komunikasi, pada tahun 2022 terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 2.384.057.700 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.201.571.112 sehingga capaian relisasi keuangan mencapai 92,74%. Secara umum target kinerja Program Infromasi dan Komunikasi Publik dapat dicapai sesuai dengan rencana sebelumnya.

c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Realisasi anggaran penyelenggaraan urusan statistik sebesar 96,45%, dari anggaran sebesar Rp. 263.938.000 dapat direalisasikan untuk penyelenggaraan urusan statistik Rp. 254.577.732. keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang ada untuk menyelenggarakan satu urusan merupakan tantangan yang cukup berat, namun demikian dengan segala keterbatasan penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral diupayakan untuk melakukan berbagai terobosan dan pada

tahun anggaran 2022: Pelaksanaan survey statistik sektoral, survey kepuasan terhadap kinerja Wali Kota, pembinaan SDM pengelola data statistik Perangkat Daerah dan pengelolaan aplikasi Open Data serta replikasi aplikasi ekosistem data Jawa Barat.

d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dengan kondisi keterbatasan sarana prasarana, sumberdaya manusia serta anggaran, beberapa layanan persandian dapat dilakukan. Layanan sertifikasi elektronik menjadi salahsatu layanan yang diselenggarakan untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan birokrasi yang efektif dan efisien. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi elektornik telah menjadi penting dewasa ini. Realisasi anggaran persandian sebesar 363.137.120 atau 88,77% dari pagu anggaran sebesar Rp. 368.137.120.

3.7. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.628.765.080 realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 11.783.745.018 atau mencapai 86,46%. Realisasi anggaran untuk setiap kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (Rp)	(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.833.656.260,00	6.015.589.013,00	88,03
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.448.500,00	41.112.498,00	99,19
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.378.000	13.334.999	99,68
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.070.500	27.777.499	98,96
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.222.069.760	5.410.693.456	86,96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.208.866.760	5.397.490.456	86,93
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.203.000	13.203.000	100,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (Rp)	(%)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.200.000,00	14.148.995,00	99,64
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.200.000,00	14.148.995,00	99,64
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.829.000,00	331.691.645,00	99,96
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.194.600,00	69.159.400,00	99,95
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.493.400,00	32.481.950,00	99,96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.072.000,00	17.022.100,00	99,71
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.069.000,00	213.028.195,00	99,98
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.566.000,00	82.956.019,00	94,74
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.010.000,00	34.711.820,00	88,98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000,00	630.513,00	90,07
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.856.000,00	47.613.686,00	99,49
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.843.000,00	129.286.400,00	98,81
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.255.000,00	44.698.400,00	96,63
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.588.000,00	29.588.000,00	100,00
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 2.384.057.700	Rp 2.201.571.112	92%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.384.057.700	Rp 2.201.571.112	92,35
	2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 241.904.800	Rp 223.524.238	92,40

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (Rp)	(%)
	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Rp 136.960.000	Rp 128.810.247	94,05
	2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Rp 2.005.192.900	Rp 1.849.236.627	92,22
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.778.149.120,00	2.948.870.041,00	78,05
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.550.401.620,00	1.755.846.731,00	68,85
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.550.401.620,00	1.755.846.731,00	68,85
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.227.747.500,00	1.193.023.310,00	97,17
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	203.500.000,00	186.973.600,00	91,88%
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	699.807.500,00	691.501.750,00	98,81
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	213.390.000,00	209.283.430,00	98,08
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	111.050.000,00	105.264.530,00	94,79
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 263.938.000	Rp 254.577.732	96,45
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 263.938.000	Rp 254.577.732	96,45
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Rp 236.750.000	Rp 228.431.882	96,49
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp 27.188.000	Rp 26.145.850	96,17
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	368.964.000,00	363.137.120,00	98,42
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	298.964.000,00	294.687.020,00	98,57

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (Rp)	(%)
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62.500.000,00	59.982.000,00	95,97
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	236.464.000,00	234.705.020,00	99,26
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	68.450.100,00	97,79
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	68.450.100,00	97,79
	TOTAL	Rp 13.628.765.080	Rp 11.783.745.018	86,46

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

No.	KENDALA/ HAMBATAN	REKOMENDASI
I	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
A	SUB URUSAN PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	
1	Belum tersedianya dokumen proses bisnis yang jelas yang dapat dijadikan acuan dalam analisis kebutuhan pengembangan aplikasi.	Menyusun kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi dengan persyaratan ketersediaan proses bisnis sebelum proses pembangunan dan pengembangan aplikasi dalam bentuk dokumen proses bisnis.
2	SDM tenaga ahli pengembangan aplikasi dan jafung Pranata Komputer belum memenuhi kebutuhan	Pemenuhan SDM melalui tenaga ahli.
3	Portal layanan publik terintegrasi secara presentasi (aplikasi terkumpul dalam satu halaman) namun belum terintegrasi secara fungsional maupun data sepenuhnya (interoperabilitas antar aplikasi)	Pembangunan aplikasi single sign on untuk kemudahan otentifikasi aplikasi
		Pengembangan portal layanan publik cimahi smart city menjadi aplikasi layanan publik tersendiri dengan penerapan single sign on
4	Belum tersedianya dokumen proses bisnis terintegrasi sebagai acuan dalam interoperabilitas aplikasi	Secara bertahap melakukan proses pengintegrasian secara fungsi dan data pada aplikasi layanan publik melalui kolaborasi dengan pemilik aplikasi
5	SDM Pengelola Jaringan TIK masih Kurang dari sisi Kompetensi maupun Jumlah baik SDM di Diskominfo maupun SDM TIK di Perangkat Daerah.	Peningkatan Kompetensi SDM

No.	KENDALA/ HAMBATAN	REKOMENDASI
6	Jaringan Intra sebagian masih menggunakan Link Fiber Optic milik Penyedia sehingga setiap tahun harus dilakukan Sewa Link FO dan untuk saat ini baru bisa	Melaksanakan Kajian Infrastruktur FO Milik Pemerintah Kota Cimahi
7	Kapasitas Server dan Penyimpanan yang masih kurang Sehubungan dengan semakin berkembangnya jumlah aplikasi dan jumlah data tersimpan.	Peningkatan Kapasitas Server (Storage dan Memory)
8	Server PDN belum optimal dimanfaatkan untuk penyimpanan backup Data maupun Aplikasi	Pembelian Server Baru
9	Arsitektur dan Peta Rencana SPBE belum menjadi rujukan pengembangan SPBE Kota Cimahi bagi seluruh Perangkat Daerah	Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
10	Terkait Indeks SPBE, hasil Monev SPBE Tahun 2021 nilai Indeks secara umum sudah Baik namun masih ada kelemahan dalam Sisi Tata Kelola SPBE terutama pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, dan Domain Manajemen SPBE meliputi Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK	Upgrade Perangkat Aktif Jaringan
	SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
1	Belum disusunnya Daftar Informasi Publik dan Standar Pelayanan Informasi	Melaksanakan Studi Tiru terkait Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan ke Pemenintah Kabupaten / Kota yang sudah Informatif
2	Belum ditetapkannya klasifikasi informasi yang dikecualikan	Melaksanakan Rapat Koordinasi untuk Menyusun DIP dan Klasifikasi Informasi yang diKecualikan
3	Belum ada Penetapan Standar Biaya Memperoleh Informasi Publik oleh Wali Kota / Sekretaris Daerah	Menetapkan Standar Biaya Memperoleh Informasi Publik

No.	KENDALA/ HAMBATAN	REKOMENDASI
4	Ketersediaan data informasi pada Website Belum Update / Lengkap	Memperbarui serta melengkapi data pada website Kota
5	Desk Layanan Informasi yang perlu ditingkatkan (Meja dan Kursi serta Fasilitas Pendukung Lainnya) sarana Publikasi (Papan Pengumuman / LCD serta Media Pendukung Lainnya	Meningkatkan Fasilitas Desk Layanan Informasi dan Sarana Publikasi
6	Belum Optimalnya PPID Pembantu di Kota Cimahi	Sosialisasi dan Koordinasi lebih persuasif ke setiap PPID Pembantu di Kota Cimahi
7	Berubah ubahnya Sistem tatanan Penilaian Monev Komisi Informasi Tingkat Provinsi Jawa Barat	Pemenuhan Data dan Evidence untuk Monitoring Evaluasi secara rinci agar apabila variabel kembali berubah kita memiliki bukti dukung
II	STATISTIK	
1	Meningkatnya ketersediaan data sektoral belum sesuai dengan prinsip satu data.	Membangun Jejaring statistik dengan perangkat daerah (Tim Pengelola Data Sektoral).
2	Terbatasnya pemahaman pengelolaan data sektoral pada perangkat daerah	2Membuat standar data sektoral sesuai prinsip satu data (Satu data dan satu sumber).
3	Lamanya pengolahan data sektoral pada pengelola data terpusat	Sinkronisasi satu data sektoral untuk menghindari tumpang tindih data/informasi dan menentukan data prioritas dan nonprioritas
4	Banyaknya keberagaman format dan tidak konsisten data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah	Pendampingan penyusunan data set sesuai prinsip satu data.
		Menyediakan layanan penyimpanan data sektoral bagi Perangkat Daerah : satu tempat (data terstandarisasi, satu sumber yang bersifat valid), layanan interoperabilitas data : CSV, Excel, API

No.	KENDALA/ HAMBATAN	REKOMENDASI
5	Belum berkualitasnya publikasi data pada open data Kota Cimahi.	Meningkatkan kemampuan pengolahan data, analisis data sektoral bagi Pengelola pada Perangkat Daerah
		Mengusulkan jabatan fungsional statistik/ analisis data ilmiah pada fungsi walidata dan produsen data.
		Memberikan penghargaan dan sanksi dalam pengelolaan data, publikasi data bagi perangkat daerah
6	Adanya kesenjangan kebutuhan data dengan ketersediaan data sektoral yang dihasilkan oleh produsen data	Mensosialisasikan portal satu data dan mekanisme validasi yang akurat kepada stack holder (masyarakat, dll) dalam pemanfaatan data.
III	URUSAN PERSANDIAN	
1	<i>Self Assesment</i> Indeks Kami Tahun 2022 belum dilengkapi dengan bahan dukung (<i>evidence</i>);	Belum terinventarisirnya Data dukung <i>Self Assesment</i> Indeks Kami Tahun 2022
2	Belum tersusunnya dokumen Manajemen Risiko;	Dokumen Manajemen Risiko sebagai hasil analisis Indeks Kami 2022 belum tersusun;
3	Perlu ada peninjauan ulang SOP Persandian dan Keamanan Informasi.	SOP Persandian dan Keamanan Informasi perlu disesuaikan dengan kondisi eksisting.